

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jl. Mgr. Soegijopranoto 105, Telp. (0298) 595259, Fax. (0298) 593844

Website : <http://www.pa-ambarawa.go.id>, email : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Bismillahirrohmannirrohiim

Segala puji bagi Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun anggaran 2020 kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan sholawat serta salam kita curahkan kepada nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya dan pengikut-Nya sampai akhir zaman.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahunan ini merupakan laporan tahun pertama sebagai implementasi Rencana Strategis 2020-2024 serta laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020 yang akan disampaikan menyusul kemudian.

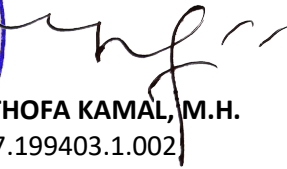
Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Pengadilan Agama Ambarawa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2020, dan diharapkan juga dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Ambarawa, 31 Desember 2020

KETUA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA


DRS. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.
NIP. 19670827.199403.1.002

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
PENDAHULUAN	1
A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.....	1
1. Manajemen Aparatur Pengadilan Agama Ambarawa	1
2. Manajemen Perkara.....	3
3. Pelayanan Informasi.....	3
4. Manajemen Administrasi Umum	4
5. Manajemen Keuangan	4
6. Pengawasan	4
B. VISI DAN MISI	5
1. VISI	5
2. MISI	5
C. RENCANA STRATEGIS	6
PENYELESAIAN PERKARA	7
A. Keadaan Perkara	7
B. Penyelesaian Perkara	7
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	7
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	8
3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali	12
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.....	14
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	15
C. Perkara Bagi Masyarakat Kurang Mampu	15
Posbakum.....	15
Perkara Prodeo	16
SUMBER DAYA MANUSIA.....	18

A.	Sumber Daya Manusia	18
1.	Mutasi	19
2.	Promosi	20
3.	Pensiun.....	21
4.	Diklat Sdm Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat	21
5.	Meninggal dunia	21
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TENOLOGI INFORMASI ...		22
A.	PENGELOLAAN KEUANGAN.....	22
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	22
2.	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	24
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	26
4.	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	28
5.	Rekapitulasi Keuangan Perkara 2020.....	29
B.	PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	30
1.	Sarana Perkantoran	30
2.	Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	34
C.	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.....	34
	Implementasi e-court.....	34
	implementasi sipp.....	35
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....		36
D.	AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	36
E.	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37
F.	INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	39
PENGAWASAN		40
A.	INTERNAL	40
B.	EVALUASI.....	41
1.	Program Penyelesaian Perkara	41
2.	Program Manajemen SDM.....	42
3.	Program Pengelolaan Website.....	43
4.	Program Pelayanan Publik dan Meja Informasi.....	45
5.	Program Implementasi SIPP.....	46

6. Program Perkara PRODEO	46
7. Pengawasan	47
PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. REKOMENDASI	48
DAFTAR PUSTAKA	iv
LAMPIRAN	A
Data Detil Perkara	B
Sisa Perkara Tahun 2019	B
Perkara Tahun 2020	D
Rasio Perkara Terhadap Majelis	G
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	H
Pos Bantuan Hukum	L
Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	N
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan	N
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	O
Statistik Pegawai Berdasarkan jenis kelamin	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Rentang usia	P
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Ambarawa	P
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan	R
Realisasi Anggaran Dipa Badan urusan Administrasi	R
Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	S
Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	T
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan urusan Administrasi	T
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	U
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi	V
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	W
Daftar Revisi DIPA	X

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	A
Data Detil Perkara	B
Sisa Perkara Tahun 2019	B
Perkara Tahun 2020	D
Rasio Perkara Terhadap Majelis.....	G
Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali	H
Pos Bantuan Hukum.....	L
Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana	N
Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat pendidikan	N
Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang.....	O
Statistik Pegawai Berdasarkan jenis kelamin.....	O
Statistik Pegawai Berdasarkan Rentang usia	P
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Ambarawa	P
Kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan.....	R
Realisasi Anggaran Dipa Badan urusan Administrasi.....	R
Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	S
Kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	T
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan urusan Administrasi	T
Komparasi Rencana Penarikan Anggaran dengan Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	U
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi	V
Komparasi Rencana Penerimaan Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama	W
Daftar Revisi DIPA	X

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Ambarawa adalah salah satu lembaga pelaku Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. Sebagai badan publik di sektor yudikatif, Pengadilan Agama Ambarawa berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

1. MANAJEMEN APARATUR PENGADILAN AGAMA AMBARAWA.

Jumlah aparatur Pengadilan Agama Ambarawa pada bulan Januari sebanyak 27 orang.

Pada bulan Januari 2020 terjadi penggantian 2 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian Perencana Teknologi Informasi dan Pelaporan lama Wahyu Puji Leksono, S.Kom. dipromosikan sebagai sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A dan digantikan oleh Martasaputra Ardhy R U yang sebelumnya Juru Sita Pengadilan Agama Karanganyar. Sedangkan untuk Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan lama Aulia Ardiyansyah Suhaely, S.H. dipromosikan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan digantikan oleh Nur Arifah Kadir, S.Kom yang sebelumnya staff Pengadilan Agama Ambarawa.

Pada Bulan Maret 2020 terjadi penggantian Panitera Muda Gugatan dimana Panitera Muda Gugatan lama Saefudin, S.H. dipromosikan sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A dan digantikan oleh Dra. Azizah Triningsih, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Agama Temanggung.

Pada bulan Juli 2020 terjadi Pengantian Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian dimana Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian yang lama Ade Husnul Khotimah Hasan, S.E. dipromosikan sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Semarang 1A dan digantikan oleh Heri Sulistiono, S.Kom yang sebelumnya staff Pengadilan Agama Ambarawa.

Pada bulan Agustus 2020 terjadi Penggantian Ketua dimana Drs. H. Musthofa Kamal, M.H. yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ambarawa menggantikan Nur Lailah Ahmad, S.H yang dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A. Dan Drs. H. SAEFUDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Ambarawa di promosikan sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta kelas 1A.

Pada bulan Oktober 2020 terjadi Penggantian Panitera dimana Panitera lama Mun'im, SH dipromosikan sebagai Panitera Pengadilan Agama Purwodadi kelas 1A dan digantikan oleh Dra. Azizah Triningsih, S.H. yang sebelumnya Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ambarawa. Sedangkan ARIFAH S. MASPEKE, S.Ag., M.H. yang sebelumnya sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa dipromosikan sebagai Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Ambarawa. Terdapat juga mutasi masuk Panitera Pengganti yaitu Ahmad Roikan, S.Sy., S.H. yang sebelumnya sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pacitan.

Pada bulan Nopember 2020 terjadi mutasi keluar, Saiful Rijal, A.Md. Jurusita Pengadilan Agama Ambarawa menjadi Jurusita Pengadilan Agama Boyolali. Dan terdapat pegawai meninggal an. Muflikh Bahaudin dikarenakan sakit.

Pada bulan Desember 2020 terjadi promosi, Siti Novida Subiyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa dipromosikan menjadi Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Wonogiri.

Dari uraian tersebut di atas menunjukkan jumlah aparatur Pengadilan Agama Ambarawa sampai akhir 2020 sebanyak 21 orang, dengan rincian sebagai berikut: Ketua 1 orang, Wakil 1 Orang, jumlah hakim sebanyak 2 orang, jumlah kepaniteraan sebanyak 12 orang, jumlah kesekretariatan sebanyak 5 orang. Jumlah tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara SDM yang tersedia dengan beban kerja yang cukup besar dengan volume jumlah perkara yang meningkat, maka dalam rangka memaksimalkan pengelolaan/manajerial aparatur Pengadilan Agama dengan sebaik-baiknya, maka kebijakan dengan rangkap jabatan yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 206/KMA/SK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Peradilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa adalah seluruh Kabupaten Semarang. Dimana sebelumnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari 10 Kecamatan setelah keluarnya surat keputusan tersebut terdapat penambahan 9 Kecamatan, sehingga total wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa menjadi 19 Kecamatan.

2. MANAJEMEN PERKARA

Administrasi peradilan dapat berjalan lancar, cepat serta tepat, dengan adanya peralatan teknologi sebagai sarana proses administrasi dengan mengefektifkan dan meningkatkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung RI yang mengacu kepada sistem kerja pola Bindalmin yang mempunyai keunggulan, diantaranya :

-) mempercepat pelayanan;
-) mudah pencarian data;
-) terintegrasi dan otomatisasi;
-) efisiensi dan efektivitas dalam penyimpanan data perkara.

3. PELAYANAN INFORMASI

- a. Terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, sebagaimana dikehendaki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SKIVIII/2007 tahun 2007 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011.
- b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan ditingkatkan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal, meliputi pelayanan:
 -) Pembukaan Website Pengadilan Agama Ambarawa, menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik melalui Website Pengadilan Agama Ambarawa www.pa-ambarawa.go.id dan email : sekretariat@pa-ambarawa.go.id dan pa_ambarawa20@yahoo.co.id.
 -) keterbukaan dibidang anggaran, informasi tentang panjar biaya perkara, penerimaan uang iwadl.
 -) Informasi jadwal sidang
 -) Informasi perkara yang meliputi tentang Informasi jadwal sidang, pengumuman ghoib, perkara yang masih dalam proses, diputus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan di minutasasi.

- c. Pelayanan informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu disediakan sarana prasarana yang memadai, berupa :
-) Penyediaan peralatan komputer
 -) Penyediaan anggaran operasional
 -) Penyediaan petugas operator TIM TI
 -) Pelatihan petugas operator TIM TI
 -) Penunjukan TIM TI
 -) Menyediakan 1 unit komputer bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi peradilan berupa Touch Screen (layar sentuh)
 -) Tersedianya akses *wifi(hot-spot)* bagi masyarakat ingin mengakses informasi dari internet.

4. MANAJEMEN ADMINISTRASI UMUM

- a. Meningkatnya kinerja pelayan publik, terhadap masyarakat pencari keadilan dan membudayakan sikap dan perilaku yang sopan, ramah, dan bijaksana untuk mewujudkan pelayanan prima.
- b. Meningkatnya disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- c. Melalui Sistem Informasi Kepegawaian dengan singkatan (SIKEP) Mahkamah Agung RI, data kepegawaian dapat di akomodasi dengan baik dan cepat dan setiap ada perubahan dalam hal kepangkatan dan lain-lain akan disesuaikan dengan data masing-masing pegawai.

5. MANAJEMEN KEUANGAN

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dan dengan Sistem Keuangan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), telah merealisasikan kebutuhan operasional Peradilan Agama yang nilainya semakin meningkat. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, sehingga anggaran yang tersedia tepat sasaran dan tepat guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

6. PENGAWASAN

Untuk mengefektifkan pengawasan, maka para Hakim diberi tugas tambahan sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai Koordinator dan penanggung jawab pengawasan. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa dengan melaksanakan pengawasan setiap bulan, membina dan menindak lanjuti hasil-hasil temuan dari Hakim Pengawas Bidang yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Ketua melalui Wakil Ketua sebagai koordinator.

Dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang efektif dibawah koordinator Wakil Ketua Pengadilan Agama diharapkan petugas dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Ambarawa yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung".

Makna Profesional adalah seluruh aparatur Peradilan Agama Untuk mencapai sukses dalam bekerja, harus mampu bersikap profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya tersebut. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

Mandiri dalam hal ini berarti seluruh aparatur peradilan agama tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dihadapi untuk diselesaikan.

2. MISI

Visi yang telah dirumuskan oleh Pengadilan Agama Ambarawa sebagaimana tertulis pada Sub Bab sebelumnya, maka oleh karena itu Pengadilan Agama Ambarawa berkewajiban untuk mewujudkan pencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi, sehingga Pengadilan Agama Ambarawa hanya tinggal menjalankan misi. Dengan demikian dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambarawa tidak keluar dari pernyataan misi tersebut di atas.

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan, bebas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Ambarawa seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Agama Ambarawa berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- e. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dalam rencana strategis kedepan, penambahan SDM menjadi salah satu prioritas mengingat adanya penambahan 9 kecamatan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa sehingga 19 kecamatan.

BAB II

PENYELESAIAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Jumlah sisa perkara pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2019 adalah sebanyak 37 perkara, dari sisa perkara tahun 2019 tersebut jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 37 maka sisa perkara 2019 yang belum diputus pada tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara merupakan tunggakan perkara tahun sebelumnya yang belum diputus pada tahun 2019. Dari 37 sisa perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Bulan	Keadaan Perkara		
		Sisa Bulan Lalu	Diputus	Sisa Bulan Ini
1	Januari	37	19	18
2	Februari	18	11	7
3	Maret	7	5	2
4	April	2	2	-
5	Mei	-		-
6	Juni	-		-
7	Juli	-		-
8	Agustus	-		-
9	September	-		-
10	Oktober	-		-
11	November	-		-
12	Desember	-		-



2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Perkara yang diputus tepat waktu adalah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020 dan dapat diselesaikan pada tahun yang sama.

KEADAAN PERKARA

Jumlah perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 sebanyak 1.678 perkara, sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 1.655 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2020 sebanyak 23 perkara.

PENYELESAIAN PERKARA

Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Ambarawa selama tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1) Sisa Tahun 2019	=	37 perkara
2) Diterima tahun 2020	=	1.641 perkara
3) Jumlah	=	1.678 perkara
4) Diputus	=	1.955 perkara
5) Sisa	=	23 perkara

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

Dari Jumlah perkara yang diputus/diselesaikan Pengadilan Ambarawa pada tahun 2020 sebanyak 1.678 perkara, yang merupakan perkara perceraian dan yang telah diterbitkan Akta Cerainya sebanyak 1.236 perkara.

Faktor penyebab terjadinya perceraian pada tahun 2020 dikelompokkan sebagai berikut :

1) Poligami Tidak Sehat	=	1 perkara
2) Krisis Akhlak	=	15 perkara
3) Cemburu	=	- perkara
4) Kawin Paksa	=	1 perkara
5) Ekonomi	=	455 perkara
6) Tidak ada Tanggungjawab/Meninggalkan Salah Satu Pihak	=	265 perkara
7) Kekerasan Dalam Rumah Tangga	=	13 perkara
8) Penganiayaan /Kekejaman Mental	=	- perkara
9) Dihukum	=	- perkara
10) Cacat Biologis	=	1 perkara
11) Murtad	=	5 perkara
12) Zina	=	16 perkara
13) Tidak ada Keharmonisan	=	668 perkara
14) Lain – lain	=	- perkara

PERKARA KHUSUS YANG MENYANGKUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2020 perkara yang salah satu pihaknya atau keduanya PNS sebanyak 25 perkara dapat dirinci sebagai berikut :

1) Cerai talak	=	6 perkara
2) Cerai gugat	=	19 perkara
3) Ijin Poligami	=	- perkara

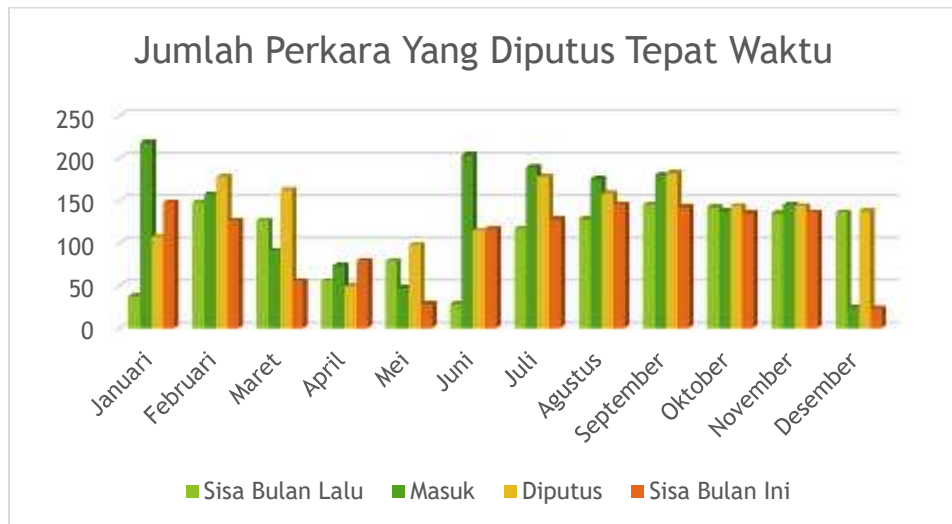
dari 25 perkara tersebut, terdiri dari :

1) Masih dalam proses	=	3 perkara
2) Selesai	=	22 perkara
3) Dicabut	=	- perkara

STATISTIK PERKARA YANG DISIDANGKAN DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Data perkara tingkat pertama yg ditangani oleh pada Pengadilan Agama Ambarawa untuk kurun waktu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Diputus	Sisa Bulan Ini
1	Januari	37	218	255	107	148
2	Februari	148	157	305	178	127
3	Maret	127	91	218	163	55
4	April	55	73	128	49	79
5	Mei	79	47	126	98	28
6	Juni	28	204	232	115	117
7	Juli	117	189	306	178	128
8	Agustus	128	175	303	158	145
9	September	145	180	325	183	142
10	Oktober	142	137	279	144	135
11	November	135	145	280	144	136
12	Desember	136	25	161	138	23
TOTAL			1.641		1.655	



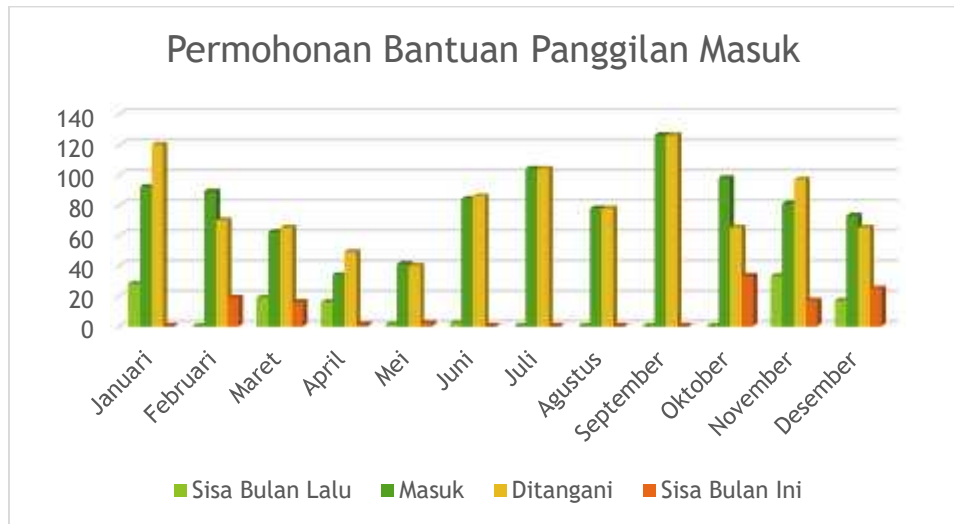
PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN

Pemohonan Bantuan Panggilan (Tabayyun) merupakan penyelesaian perkara dimana salah satu pihak yang berperkara berdomisili di luar wilayah kerja Pengadilan Agama yang menangani perkara dengan melibatkan Pengadilan Agama lain sesuai dengan domisili para pihak tersebut. Selama tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa menangani permohonan bantuan panggilan sebanyak 1.577 perkara dimana untuk permohonan bantuan panggilan masuk sebanyak 990 perkara dan permohonan bantuan panggilan keluar sebanyak 587 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN MASUK

Data permohonan bantuan panggilan masuk pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				Sisa Bulan Ini
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditangani	
1	Januari	28	92	120	120	-
2	Februari	-	89	89	70	19
3	Maret	19	62	81	65	16
4	April	16	34	50	49	1
5	Mei	1	41	42	40	2
6	Juni	2	84	86	86	-
7	Juli	-	104	104	104	-
8	Agustus	-	78	78	78	-
9	September	-	126	126	126	-
10	Oktober	-	98	98	65	33
11	November	33	81	114	97	17
12	Desember	17	73	90	65	25
TOTAL			962		965	



PERMOHONAN BANTUAN PANGGILAN KELUAR

Data permohonan bantuan panggilan keluar pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Keadaan Perkara				
		Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Ditangani	Sisa Bulan Ini
1	Januari	-	82	82	82	-
2	Februari	-	66	66	66	-
3	Maret	-	71	71	71	-
4	April	-	25	25	25	-
5	Mei	-	23	23	23	-
6	Juni	-	12	12	12	-
7	Juli	-	48	48	48	-
8	Agustus	-	44	44	44	-
9	September	-	87	87	87	-
10	Oktober	-	49	49	49	-
11	November	-	51	51	51	-
12	Desember	-	29	29	29	-
TOTAL			587		587	



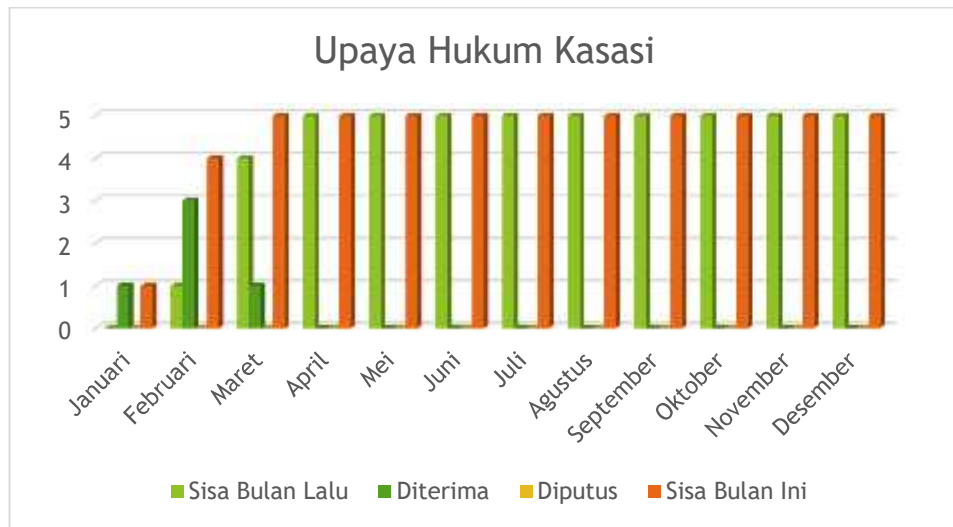
3. JUMLAH PERKARA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Data perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 7 perkara yang terdiri dari 1 perkara tahun 2019 dan 6 perkara baru tahun 2020. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 4 perkara sehingga sisa perkara Banding tahun 2020 sebanyak 3 perkara. Adapun data perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 5 perkara yang terdiri dari 1 perkara tahun 2018 dan 4 perkara tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 0 perkara sehingga sisa perkara Kasasi tahun 2019 sebanyak 5 perkara.

Data perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 2 perkara yang terdiri dari 1 perkara tahun 2016 dan 1 perkara tahun 2018. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 2 perkara sehingga sisa perkara Peninjauan Kembali tahun 2020 sebanyak 0 perkara.

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu			Diterima			Diputus			Sisa Bulan Ini		
		B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK	B	K	PK
1	Januari	4	-	2	1	1	-	-	-	-	5	1	2
2	Februari	5	1	2	1	3	-	3	-	-	3	4	2
3	Maret	3	4	2	-	1	-	-	-	-	3	5	2
4	April	3	5	2	-	-	-	2	-	-	1	5	2
5	Mei	1	5	2	2	-	-	1	-	-	2	5	2
6	Juni	2	5	2	-	-	-	-	-	-	2	5	2
7	Juli	2	5	2	-	-	-	1	-	-	1	5	2
8	Agustus	1	5	2	-	-	-	1	-	1	-	5	1
9	September	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1
10	Oktober	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-
11	November	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
12	Desember	-	5	-	3	-	-	-	-	-	3	5	-
TOTAL					7	5	-	8	-	2			



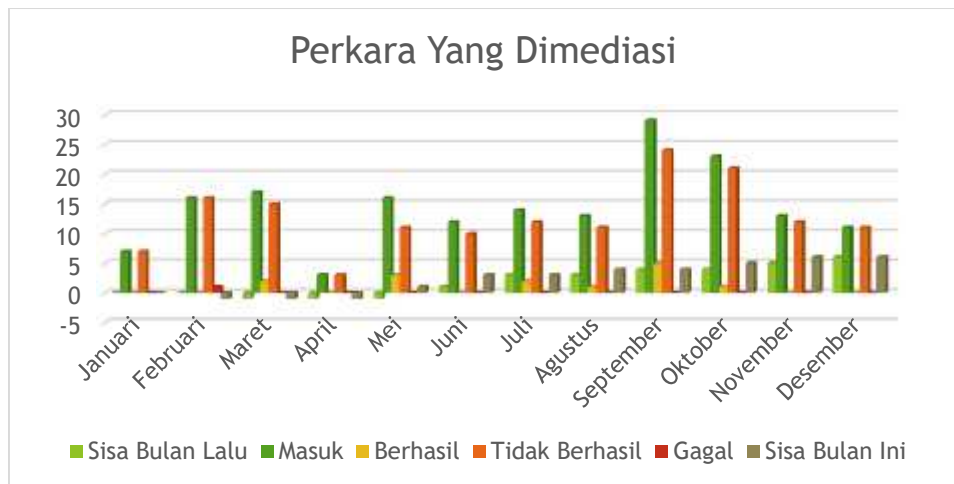


4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Data perkara yang dilakukan proses mediasi pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 174 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak 11 perkara sehingga perkara yang tidak berhasil dilakukan Mediasi di tahun 2020 sebanyak 184 perkara dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

No.	Bulan	Perkara Yang Dimediasi					
		Sisa Perkara	Masuk	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Sisa Bulan Ini
1	Januari	-	7	-	7	-	-
2	Februari	-	16	-	16	1	1
3	Maret	-	1	17	2	15	-
4	April	-	1	3	-	3	-
5	Mei	-	1	16	3	11	-
6	Juni	-	1	12	-	10	-
7	Juli	-	3	14	2	12	-
8	Agustus	-	3	13	1	11	-
9	September	-	4	29	5	24	-
10	Oktober	-	4	23	1	21	-
11	November	-	5	13	-	12	-
12	Desember	-	6	11	-	11	-
TOTAL			174	14	153	1	



5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada Pengadilan Agama Ambarawa tidak terdapat perkara anak yang berhasil melalui diversi yang ditangani.

C. PERKARA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

Sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang kemudian dirincikan di Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

POSBAKUM

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi anggaran Posbakum sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Jam Layanan sebesar 600 Jam Layanan dan target perkara yang

ditangani sebesar 255 Perkara. Dari alokasi anggaran dan target tersebut dapat diserap anggaran sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah jam layanan tercapai sebesar 600 jam layanan dan perkara yang dilayani sebanyak 583 Perkara dari 600 Layanan yang diberikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Bulan	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Total	Jumlah Layanan	Jumlah Perkara
1	Januari	-	2.805.000	2.805.000	39	33
2	Februari	2.805.000	2.640.000	5.445.000	53	50
3	Maret	5.445.000	2.805.000	8.250.000	37	37
4	April	8.250.000	2.970.000	11.220.000	23	21
5	Mei	11.220.000	1.815.000	13.035.000	15	12
6	Juni	13.035.000	2.805.000	15.840.000	58	58
7	Juli	15.840.000	2.970.000	18.810.000	58	58
8	Agustus	18.810.000	2.475.000	21.285.000	63	63
9	September	21.285.000	2.970.000	24.255.000	84	81
10	Oktober	-	2.640.000	2.640.000	63	63
11	November	2.640.000	2.805.000	5.445.000	80	80
12	Desember	5.445.000	300.000	5.745.000	27	27
TOTAL			30.000.000		600	583

PERKARA PRODEO

Perkara prodeo menurut Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Program ini merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI dalam menunjang pelaksanaan Indikator Utama yang dalam pelaksanaannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sebagaimana tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran perkara Prodeo untuk 10 perkara dengan pagu anggaran per perkara sebesar Rp. 250.000,- dimana pada tahun 2020 dapat terserap sepenuhnya sebanyak 10 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

No.	Bulan	Realisasi Anggaran			Jumlah Perkara
		s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Total	
1	Januari	-	250.000	250.000	1
2	Februari	250.000	250.000	500.000	1
3	Maret	500.000	750.000	1.250.000	3
4	April	1.250.000	500.000	1.750.000	2
5	Mei	1.750.000	250.000	2.000.000	1
6	Juni	2.000.000	500.000	2.500.000	2
7	Juli	2.500.000	-	2.500.000	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
TOTAL			2.500.000		10

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa berjumlah 31 orang yang terdiri dari 21 PNS/Hakim dan 10 orang tenaga honorer, adapun lebih detailnya disajikan dalam data sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Ketua	
2.	Ishak Lubis, S.Ag	Wakil Ketua	
3.	Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.	Hakim	
4.	Rashif Imany, SHI., MSI	Hakim	
5.	Dra. Azizah Triningsih, S.H.	Panitera	
6.	Fenia Ariasti, SE., MH.	Sekretaris	
7.	Dra. Widad	Panitera Muda Hukum	
8.	Arifah S. Maspeke, S. Ag.	Panitera Muda Gugatan	
9.	Mohammad Adib Fajrudin, S. Ag.	Panitera Muda Permohonan	
10.	Martasaputra A R U	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	
11.	Nur Arifah Kadir, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	
12.	Heri Sulistiono, S.Kom	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian	
13.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Panitera Pengganti	
14.	Ana Jatmikowati, S.Pdi	Panitera Pengganti	
15.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
16.	M Nur Hasan Latief, SHI.,SH.,MM.	Panitera Pengganti	
17.	Sukarna, SHI	Panitera Pengganti	
18.	Ahmad Roikan, S.Sy., S.H.	Panitera Pengganti	
19.	Adnani	Jurusita Pengganti	
20.	Sabar Budi Santosa	Jurusita Pengganti	
21.	Dicka Martyastanti, S.Psi	Staf Pelaksana	

Kebutuhan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Ambarawa di tahun anggaran 2020 jika dilihat dari rasio perbandingan porsi pegawai yang ada, maka akan terlihat terdapat ketimpangan antara jumlah pegawai pada setiap bagian. Jika dilihat dari rasio jumlah perkara yang ditangani sebanyak sekitar 1.678 perkara berbanding dengan jumlah majelis hakim sebanyak 4 orang maka rata-rata setiap hakim yang menjadi ketua majelis harus menangani perkara sebanyak 419 setiap tahun atau 2 perkara per hari.

Untuk bagian kepaniteraan jika dilihat dari jumlah personel yang ada bisa dikatakan cukup memadai. Sedangkan bagian sekretariat masih terdapat kekurangan personil staf pada setiap sub bagian terutama pada sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan serta sub bagian Umum dan Keuangan.

Terlebih lagi di tahun 2021 mendatang jika penambahan 9

1. MUTASI

Data mutasi Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2019 terbagi menjadi Mutasi Masuk dan Mutasi keluar dengan penjelasan detil sebagai berikut:

MUTASI MASUK

Data Mutasi Masuk Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

N O	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SATKER ASAL	TMT
1.	Ishak Lubis, S.Ag	Ketua	Wakil Ketua	PA Tarutung Klas II Sumatera Utara	27-08-2020
2.	Dra. Azizah Triningsih, S.H.	Wakil Panitera	Panitera Muda Gugatan	PA Temanggung	18-03-2020
3.	Martasaputra A R U	Jurusita	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	PA Karanganyar	31-01-2020
4.	Ahmad Roikan, S.Sy., S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PA Pacitan	23-10-2020

--	--	--	--	--	--

MUTASI KELUAR

Data Mutasi Keluar Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	SATKER TUJUAN	TMT
1.	Nur Lailah Ahmad, S.H.	Ketua	Wakil Ketua	PA Kendal Klas IA	14-08-2020
2.	Drs. H. Saefudin, SH.,MH	Hakim	Hakim	PA Yogyakarta Klas IA	31-08-2020
3.	Mun'im, SH	Panitera	Panitera	PA Purwodadi Klas IA	19-10-2020
4.	Saefudin, SH	Panitera Muda Gugatan	Panitera Muda Hukum	PA Semarang Klas IA	11-03-2020
5.	Wahyu Puji Leksono	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	PA Banjarnegara Klas IA	22-01-2020
6.	Aulia Ardiyansyah Suhaely, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	PTA Semarang	20-01-2020
7.	Ade Husnul Khotimah Hasan, SE	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	PA Semarang Klas IA	29-07-2020
8.	Siti Novida Subiyanti, S.H.	Panitera Pengganti	Panitera Pengganti	PA Wonogiri	04-12-2020
9.	Saiful Rijal, A.Md	Jurusita	Jurusita	PA Boyolali	16-11-2020

2. PROMOSI

Data promosi Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS PROMOSI	TMT	KETERANGAN
1.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Pengangkatan Ketua	12-08-2020	

2.	Nur Lailah Ahmad, SH	Pengangkatan Wakil Ketua Kelas IA	14-08-2020	
3.	Ishak Lubis, S.Ag	Pengangkatan Wakil Ketua		
4.	Drs. H. Saefudin, SH.,MH	Kenaikan Kelas Pengadilan I.A		
5.	Mun'im, SH	Kenaikan Kelas Pengadilan I.A		
6.	Dra. Azizah Triningsih, S.H.	Pengangkatan Panitera		
7.	Saefudin, SH	Kenaikan Kelas Pengadilan I.A		

3. PENSIUN

Data Pensiun Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	Keterangan
1.	Hj. Robikah Maskimayah, S.H.	Wakil Panitera	01-01-2020	

4. DIKLAT SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT

Data Diklat baik SDM Teknis maupun Non Teknis Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa yang telah mengikuti diklat untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NAMA DIKLAT	Keterangan
	- NIHIL -		

5. MENINGGAL DUNIA

Data Meninggal Dunia Pegawai Pengadilan Agama Ambarawa untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	Keterangan
1.	Muflikh Bahaudin	Staff	10-10-2020	

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TENOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan bidang keuangan Pengadilan Agama Ambarawa telah menetapkan perencanaan pembelanjaan untuk menuju pencapaian target penyerapan anggaran yang maksimal. Pengelolaan keuangan DIPA Pengadilan Agama Ambarawa terbagi menjadi 3 (tiga) buah program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI serta Program Peningkatan Manajemen Peradilan. Selain 3 (tiga) program diatas, Pengadilan Agama Ambarawa juga terus berupaya memaksimalkan rencana pencapaian realisasi penerimaan anggaran melalui PNBP.

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI terbagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 3.933.908.000,- dimana pada akhir tahun 2020 ini berhasil terserap sebesar Rp. 3.912.419.469,- atau sebanyak 99,45 %. Adapun rincian dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA			TOTAL DIPA
		PEGAWAI	BARANG OPERASIONAL	BARANG NON OPERASIONAL	
JANUARI	Anggaran 2020	2.933.749.000	1.000.159.000		3.933.908.000,00
	Realisasi	203.904.978	28.913.200		232.818.178
	Sisa	2.729.844.022	971.245.800		3.701.089.822
	Prosentase (%)	6,95	2,89		5,92
FEBRUARI	Anggaran 2020	2.729.844.022	971.245.800		3.701.089.822
	Realisasi	426.418.156	319.787.300		746.205.456
	Sisa	2.507.330.844	680.371.700		3.187.702.544
	Prosentase (%)	14,53	31,97		18,97

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

MARET	Anggaran 2020	2.507.330.844	680.371.700		3.187.702.544
	Realisasi	648.495.026	379.901.500		1.028.396.526
	Sisa	2.285.253.974	620.257.500		2.905.511.474
	Prosentase (%)	22,10	37,98		26,14
APRIL	Anggaran 2020	2.285.253.974	620.257.500		2.905.511.474
	Realisasi	871.669.800	433.969.700		1.305.639.500
	Sisa	2.062.079.200	566.189.300		2.628.268.500
	Prosentase (%)	29,71	43,39		33,19
MEI	Anggaran 2020	2.062.079.200	566.189.300		2.628.268.500
	Realisasi	1.221.642.215	509.753.700		1.731.395.915
	Sisa	1.712.106.785	490.405.300		2.202.512.085
	Prosentase (%)	41,64	50,97		44,01
JUNI	Anggaran 2020	1.712.106.785	490.405.300		2.202.512.085
	Realisasi	1.444.796.486	572.364.000		2.017.160.486
	Sisa	1.488.952.514	427.795.000		1.916.747.514
	Prosentase (%)	49,25	57,23		51,28
JULI	Anggaran 2020	1.488.952.514	427.795.000		1.916.747.514
	Realisasi	1.669.680.434	625.504.100		2.295.184.534
	Sisa	1.264.068.566	374.654.900		1.638.723.466
	Prosentase (%)	56,91	62,54		58,34
AGUSTUS	Anggaran 2020	1.264.068.566	374.654.900		1.638.723.466
	Realisasi	2.102.276.978	722.289.912		2.824.566.890
	Sisa	831.472.022	277.869.088		1.109.341.110
	Prosentase (%)	71,66	72,22		71,80
SEPTEMBER	Anggaran 2020	831.472.022	277.869.088		1.109.341.110
	Realisasi	2.323.089.503	787.865.916		3.110.955.419
	Sisa	610.659.497	212.293.084		822.952.581
	Prosentase (%)	79,19	78,77		79,08
OKTOBER	Anggaran 2020	610.659.497	212.293.084		822.952.581
	Realisasi	2.520.683.987	839.545.962		3.360.229.949
	Sisa	413.065.013	160.613.038		573.678.051
	Prosentase (%)	85,92	78,77		85,42
NOVEMBER	Anggaran 2020	413.065.013	160.613.038		573.678.051
	Realisasi	2.715.229.610	903.979.766		3.619.209.376
	Sisa	218.519.390	96.179.234		314.698.624
	Prosentase (%)	92,55	83,94		92,00
DESEMBER	Anggaran 2020	218.519.390	96.179.234		314.698.624
	Realisasi	2.913.038.044	999.381.425		3.912.419.469
	Sisa	20.710.956	777.575		21.488.531
	Prosentase (%)	99,29	99,92		99,45



2. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI merupakan program pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan aparaturnya Mahkamah Agung RI kepada masyarakat. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 1.334.778.000,- dimana pada akhir tahun 2020 ini berhasil terserap sebesar Rp. 1.334.715.614,- atau sebanyak 99,9953 %. Untuk tahun 2020, program ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis belanja modal yaitu Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Perangkat Fasilitas Perkantoran dan Renovasi Gedung dan Bangunan. Adapun rincian pelaksanaan program ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA			TOTAL DIPA
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Perangkat Fasilitas Perkantoran	Renovasi Gedung dan Bangunan	
JANUARI	Anggaran 2020	71.500.000	283.452.000	979.826.000	1.334.778.000
	Realisasi	0	3.510.000	3.400.000	6.910.000
	Sisa	71.500.000	279.942.000	976.426.000	1.327.868.000
	Prosentase (%)	0	1,24	0,35	0,52
FEBRUARI	Anggaran 2020	71.500.000	279.942.000	976.426.000	1.327.868.000
	Realisasi	0	686.000	117.318.414	118.004.414

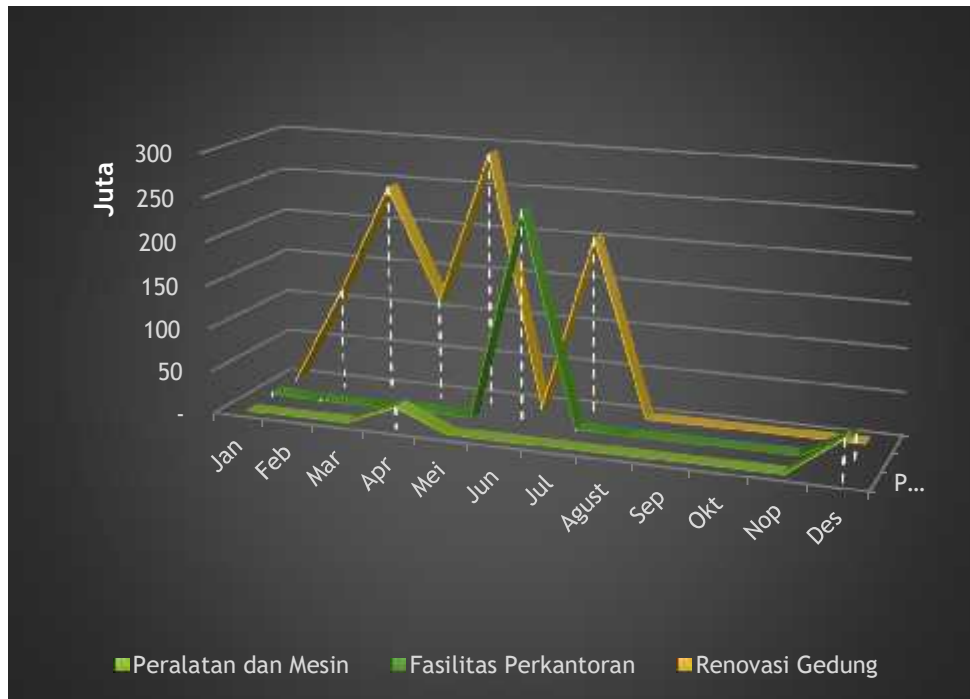
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

	Sisa	71.500.000	279.256.000	859.107.586	1.209.863.586
	Prosentase (%)	0	1,48	12,32	9,36
MARET	Anggaran 2020	71.500.000	279.256.000	859.107.586	1.209.863.586
	Realisasi	0	0	245.100.000	245.100.000
	Sisa	71.500.000	279.256.000	614.007.586	964.763.586
	Prosentase (%)	0	1,48	37,34	27,72
	Anggaran 2020	71.500.000	279.256.000	614.007.586	964.763.586
APRIL	Realisasi	25.000.000	2.727.300,00	116.900.000	144.627.300
	Sisa	46.500.000	276.528.700	497.107.586	820.136.286
	Prosentase (%)	34,97	2,44	49,27	38,56
	Anggaran 2020	46.500.000	276.528.700	497.107.586	820.136.286
MEI	Realisasi	0	0	291.717.000	291.717.000
	Sisa	46.500.000	276.528.700	205.390.586	528.419.286
	Prosentase (%)	34,97	2,44	79,04	60,41
	Anggaran 2020	46.500.000	276.528.700	497.107.586	820.136.286
JUNI	Realisasi	0	244.351.900	691.000	245.042.900
	Sisa	46.500.000	30.601.800	204.699.586	283.376.386
	Prosentase (%)	34,97	88,65	79,11	78,77
	Anggaran 2020	46.500.000	32.176.800	205.390.586	528.419.286
JULI	Realisasi	0	1.575.000	204.639.000	206.214.000
	Sisa	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
	Prosentase (%)	34,97	89,20	99,99	94,22
	Anggaran 2020	46.500.000	32.176.800	204.699.586	283.376.386
AGUSTUS	Realisasi	0	0	0	0
	Sisa	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
	Prosentase (%)	34,97	89,20	99,99	94,22
	Anggaran 2020	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
SEPTEMBER	Realisasi	0	0	0	0
	Sisa	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
	Prosentase (%)	34,97	89,20	99,99	94,22
	Anggaran 2020	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
OKTOBER	Realisasi	0	0	0	0
	Sisa	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
	Prosentase (%)	34,97	89,20	99,99	94,22
	Anggaran 2020	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
NOVEMBER	Realisasi	0	0	0	0
	Sisa	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
	Prosentase (%)	34,97	89,20	99,99	94,22
	Anggaran 2020	46.500.000	30.601.800	60.586	77.162.386
DESEMBER	Realisasi	46.500.000	30.600.000	0	77.100.000
	Sisa	0	1.800	60.586	62.386

	Prosentase (%)	100	99,999	99,99	99,9953
--	----------------	-----	--------	-------	---------

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN

Berbeda dengan kedua program yang sudah dijabarkan diatas dimana tanggung



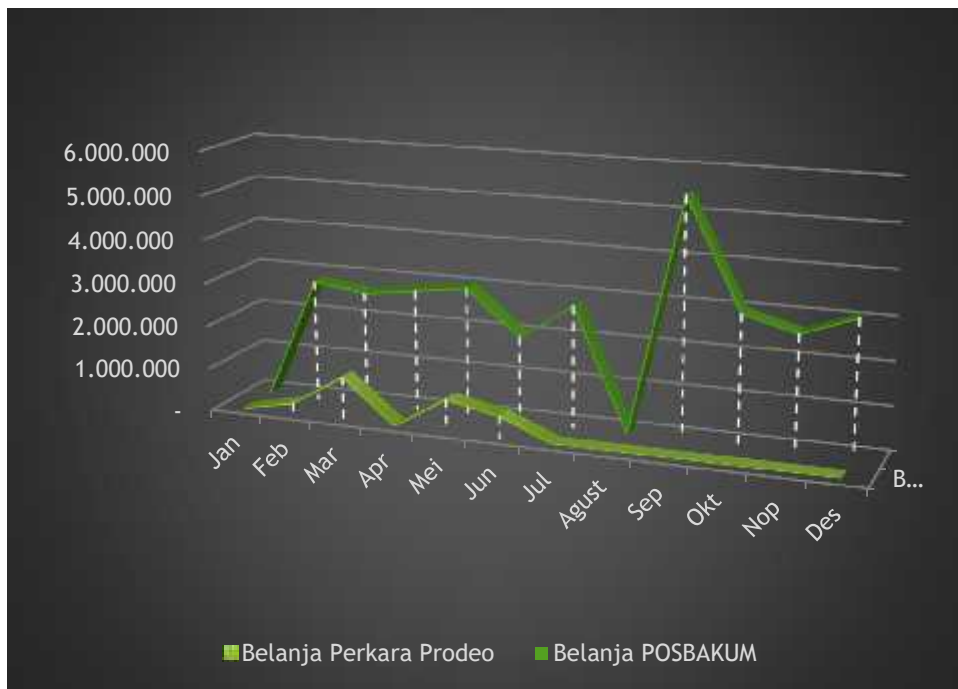
jawab vertikal disampaikan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, program peningkatan manajemen peradilan merupakan program yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa mendapatkan alokasi PAGU anggaran untuk program peningkatan manajemen Peradilan sebesar Rp. 30.150.000,- dimana pada akhir tahun 2020 ini berhasil terserap sebesar Rp. 30.150.000,- atau sebanyak 100 %. Program ini diberikan sebagai bentuk pelayanan langsung yang berkaitan dengan masyarakat. Penjabaran dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

BULAN	URAIAN	BELANJA PERKARA PRODEO	BELANJA POSBAKUM	TOTAL DIPA
JANUARI	Anggaran 2020	2.500.000	30.150.000	32.650.000
	Realisasi	0	0	0
	Sisa	2.500.000	30.150.000	32.650.000
	Prosentase (%)	0	0	0
FEBRUARI	Anggaran 2020	2.500.000	30.150.000	32.650.000
	Realisasi	250.000	2.805.000	3.055.000

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

	Sisa	2.250.000	27.345.000	29.595.000
	Prosentase (%)	10	9,30	9,36
MARET	Anggaran 2020	2.250.000	27.345.000	29.595.000
	Realisasi	1.000.000	2.640.000	3.640.000
	Sisa	1.250.000	24.705.000	25.955.000
	Prosentase (%)	50	18,06	20,51
	Anggaran 2020	1.250.000	24.705.000	25.955.000
APRIL	Realisasi	0	2.805.000	2.805.000
	Sisa	1.250.000	21.900.000	23.150.000
	Prosentase (%)	50	27,36	29,10
	Anggaran 2020	1.250.000	21.900.000	23.150.000
MEI	Realisasi	750.000	2.970.000	3.720.000
	Sisa	500.000	18.930.000	19.430.000
	Prosentase (%)	100	37,21	40,49
	Anggaran 2020	500.000	18.930.000	19.430.000
JUNI	Realisasi	500.000	1.965.000	2.465.000
	Sisa	0	16.965.000	16.965.000
	Prosentase (%)	100	43,73	48,04
	Anggaran 2020	0	16.965.000	16.965.000
JULI	Realisasi	2.805.000	2.805.000	2.805.000
	Sisa	0	14.160.000	14.160.000
	Prosentase (%)	100	53,03	56,63
	Anggaran 2020	0	14.160.000	14.160.000
AGUSTUS	Realisasi	0	0	0
	Sisa	0	14.160.000	14.160.000
	Prosentase (%)	100	53,03	56,63
	Anggaran 2020	0	14.160.000	14.160.000
SEPTEMBER	Realisasi	0	5.445.000	5.445.000
	Sisa	0	8.715.000	8.715.000
	Prosentase (%)	100	71,09	73,31
	Anggaran 2020	0	8.715.000	8.715.000
OKTOBER	Realisasi	0	2.970.000	2.970.000
	Sisa	0	5.745.000	5.745.000
	Prosentase (%)	100	80,95	82,40
	Anggaran 2020	0	5.745.000	5.745.000
NOVEMBER	Realisasi	0	2.640.000	2.640.000
	Sisa	0	3.105.000	3.105.000
	Prosentase (%)	100	89,70	90,49
	Anggaran 2020	0	3.105.000	3.105.000
DESEMBER	Realisasi	0	3.105.000	3.105.000
	Sisa	0	0	0
	Anggaran 2020	0	0	0

	Prosentase (%)	100	100	100
--	----------------	-----	-----	-----



4. REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Selain pencapaian penyerapan target penyerapan anggaran, Pengadilan Agama Ambarawa juga cukup berhasil dalam pencapaian rencana anggaran penerimaan negara melalui PNBP. Adapun realisasi dari PNBP Pengadilan Agama Ambarawa tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

BULAN	DIPA 01	DIPA 04	TOTAL PNBP
JANUARI	69.762	15.880.000	15.949.762
FEBRUARI	69.798	14.271.000	14.340.798
MARET	69.762	10.204.000	10.273.762
APRIL	69.762	5.932.000	6.001.762
MEI	69.762	5.313.500	5.383.262
JUNI	69.762	7.941.500	8.011.262
JULI	69.762	22.162.000	22.231.762
AGUSTUS	69.762	8.036.500	8.106.262
SEPTEMBER	69.762	19.330.500	19.400.262
OKTOBER	69.762	9.880.500	9.950.262
NOVEMBER	139.524	4.792.500	4.932.024

DESEMBER	139.524	1.392.500	1.532.024
JUMLAH	837.180	125.136.500	126.113.204



5. REKAPITULASI KEUANGAN PERKARA 2020

Saldo awal keuangan perkara Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 adalah sebesar Rp. 94.569.000,- Selama tahun 2020 total penerimaan pemasukan keuangan perkara yang berasal dari Panjar Biaya Perkara, Biaya Eksekusi, Biaya Konsinyasi di Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebesar Rp. 1.108.686.000,-, adapun total pengeluaran yang terdiri dari biaya proses, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya pengiriman, materai dan lain-lain adalah sebesar Rp. 1.137.651.500,-, sehingga saldo akhir keuangan perkara Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 sebesar Rp. 65.603.000 dengan perincian sebagai berikut:

BULAN	SALDO AWAL	PEMASUKAN	PENGELUARAN			SALDO AKHIR
			BIAYA	PSP	TOTAL	
JANUARI	94.569.000	148.048.000	111.019.000	22.075.000	133.094.000	109.523.000
FEBRUARI	109.523.000	113.381.000	91.398.000	22.150.000	113.548.000	109.356.000
MARET	109.356.000	65.442.000	71.436.000	18.425.000	89.861.000	84.937.000
APRIL	84.937.000	47.422.000	39.201.500	5.285.000	44.486.500	87.872.500
MEI	87.872.500	33.611.000	37.855.000	11.340.000	49.195.000	72.288.500
JUNI	72.288.500	126.917.000	77.779.500	17.550.000	95.329.500	103.876.000
JULI	103.876.000	117.739.000	108.066.500	23.505.000	131.571.500	90.043.500
AGUSTUS	90.043.500	116.994.000	76.622.000	17.151.000	93.773.000	113.264.500
SEPTEMBER	113.264.500	131.228.000	106.248.000	21.150.000	127.398.000	117.094.500
OKTOBER	117.094.500	92.668.000	91.169.000	19.560.000	110.729.000	99.033.500
NOVEMBER	99.033.500	91.075.000	79.885.000	14.050.000	93.935.000	96.173.500
DESEMBER	96.173.500	24.161.000	37.297.000	17.434.000	54.731.000	65.603.500
TOTAL		1.108.686.000	927.976.500	209.675.000	1.137.651.500	

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengertian Sarana dan Prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari sarana perkantoran dan sarana teknologi informasi.

1. SARANA PERKANTORAN

Sarana perkantoran Pengadilan Agama Ambarawa selengkapnya dapat dilihat pada data sebagai berikut :

KENDARAAN DINAS

Data kendaraan dinas yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Innova	2006	1	-	-	
2.	Toyota Avanza	2018	1	-	-	
II	Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Mega Pro	2005	1	-	-	
2.	Honda Supra	2007	1	-	-	
3.	Honda Supra	2007	1	-	-	

GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR

Data rumah dinas yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	GEDUNG KANTOR					
1.	Gedung Kantor	1	1	-	-	
2.	Mushola	1	1	-	-	
II	RUMAH DINAS					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	
3.	Rumah Dinas Hakim	2	2	-	-	
4.	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-	

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Data Inventaris Kantor yang terdapat pada Pengadilan Agama Ambarawa tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak berat	
I	RUANG KANTOR					
1.	Ruang Ketua	1	1	-	-	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-	
3.	Ruang Hakim	1	1	-	-	
4.	Ruang Panitera	1	1	-	-	
5.	Ruang Sekretaris	1	1	-	-	
6.	Ruang Kepaniteraan	1	1	-	-	
7.	Ruang Sekretariat	1	1	-	-	
8.	Ruang Pelayanan	1	1	-	-	
9.	Ruang Sidang Umum	3	3	-	-	
10.	Ruang Arsip	2	2	-	-	
11.	Ruang Tunggu	2	2	-	-	
12.	Ruang Mediasi	1	1	-	-	
13.	Ruang Kaukus	1	1	-	-	

15.	Ruang Bendahara	1	1	-	-	
16.	Ruang Panitera Pengganti	1	1	-	-	
17.	Ruang Jurusita	1	1	-	-	
18.	Ruang Rapat	1	1	-	-	
19.	Ruang Aula	1	1	-	-	
20.	Ruang Media Center	1	1	-	-	
21.	Ruang Server	1	1	-	-	
22.	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-	
23.	Ruang Panel	1	1	-	-	
24.	Ruang Pantri 2	2	2	-	-	
25.	Ruang Laktasi & Bermain anak	1	1	-	-	
II	SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN					
1.	PC Unit	47	46	-	1	
2.	Laptop	19	18	-	1	
3.	Note book	2	2	-	-	
4.	CPU	1	1	-	-	
5.	Monitor	1	1	-	-	
6.	Printer	23	22	-	1	
7.	Scanner	5	5	-	-	
8.	Server	3	3	-	-	
9.	Router	1	1	-	-	
10.	Modem	2	2	-	-	
11.	Rak Server	2	2	-	-	
12.	Alat tenis Meja	1	1	-	-	
13.	Pagar Permanen	2	2	-	-	
14.	PABX	1	1	-	-	
15.	AC Split	29	29	-	-	
16.	Portable Air Conditioner	2	2	-	-	
17.	Kipas Angin	8	5	-	3	
18.	Kompor Gas	1	1	-	-	
19.	Tabung Gas	1	1	-	-	
20.	Rak piring Alumunium	1	1	-	-	
21.	Televisi	3	3	-	-	
22.	Tape Recorder	3	2	-	1	
23.	Amplifier	2	2	-	-	
24.	Loudspeaker	1	1	-	-	
25.	Sound System	1	1	-	-	
26.	Microphone	2	2	-	-	

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

27.	Stabilisator	8	8	-	-
28.	Alat Hiasan	3	-	-	3
29.	Lambang Garuda Pancasila	5	4	-	1
30.	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2	2	-	-
31.	Tiang Bendera	8	8	-	-
32.	Kaca Hias	5	4	-	1
33.	Dispenser	2	2	-	-
34.	Palu Sidang	2	2	-	-
35.	Lambang Instansi	9	8	-	1
36.	Karpet	1	1	-	-
37.	Gordyn/Kray	3	-	-	3
38.	Bracket Standing	1	1	-	-
39.	UPS	9	9	-	-
40.	Telephone	2	2	-	-
41.	Pesawat telephone	2	2	-	-
42.	Faximile	1	1	-	-
43.	Fingerprint	1	1	-	-
44.	Kursi Dorong	2	2	-	-
45.	Komputer Jaringan Lainnya	2	2	-	-
46.	Genset	1	1	-	-
47.	TV Media	1	1	-	-
48.	Meja Kayu	64	60	-	4
49.	Kursi Besi Metal	223	193	-	30
50.	Kursi Kayu	67	46	-	21
51.	Sice	12	12	-	-
52.	Bangku Kayu Panjang	12	12	-	-
53.	Meja Komputer	6	6	-	-
54.	Meja Telepon	4	4	-	-
55.	Meja Resepsionis	1	1	-	-
56.	Sketsel	1	1	-	-
57.	Pot Bunga	7	7	-	-
58.	Partisi	6	6	-	-
59.	Gantungan Jas	3	-	-	3
60.	Jam Elektronik	10	10	-	-
61.	Almari Besi	10	10	-	-
62.	Almari Kayu	25	15	-	10
63.	Rak Besi	20	20	-	-
64.	Rak Kayu	7	3	-	4

65.	Filing Cabinet Besi	14	9	-	5
66.	Filing cabinet Kayu	1	1	-	-
67.	Brandkas	2	2	-	-
68.	Papan Visual/Papan Nama	10	8	-	2
69.	White Board	6	6	-	-
70.	Peta	1	1	-	-
71.	Mesin Antrian	1	1	-	-
72.	Perkakas Kantor Lainnya	5	4	-	1
73.	Mesin Ketik Manual	10	6	-	4
74.	Mesin Hitung Elektronik	2	1	1	-
75.	Mesin Fotocopy	1	1	-	-
76.	Monografi	34	34	-	-
77.	Bahan Kartografi Lainnya	1	1	-	-
78.	Piala	6	6	-	-
79.	Piagam	2	2	-	-
80.	Software Komputer	1	1	-	-
81.	Aset Tak Berwujud	0	0	-	-

2. KEGIATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

-) Pengajuan usul Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Melaksanakan pemeliharaan gedung dan bangunan baik gedung kantor utama maupun rumah dinas pegawai Pengadilan Agama Ambarawa.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Saat ini implementasi teknologi informasi adalah sebuah keharusan dalam upaya mendukung kegiatan operasional pegawai Pengadilan Agama Ambarawa. Bisa dikatakan tanpa adanya teknologi informasi maka kegiatan operasional suatu kantor tidak akan berjalan secara optimal bahkan bisa dikatakan mati. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan dalam hal dukungan Teknologi Informasi maka Pengadilan Agama Ambarawa melakukan upaya – upaya yang dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

IMPLEMENTASI E-COURT

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman

bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan yang berada dibawah MA RI salah satunya adalah Pengadilan Agama Ambarawa yang berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Ambarawa merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B yang bertempat di Kabupaten Semarang dengan jumlah 1000-2500 perkara dalam satu tahun.

Berdasarkan Perma No. 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara peradilan secara elektronik, mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (4) undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Disamping itu, dalam Perma No. 3 tahun 2018 Pasal 22 menyebutkan ketua atau kepala pengadilan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proses serta layanan administrasi perkara secara elektronik. Guna mendukung hal ini MA RI menyediakan fasilitas layanan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang disebut *elektronik Court (e-Court)*. Saat ini, *e-Court* berlaku dan diterapkan diseluruh badan peradilan, kecuali pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama. Pengadilan Agama Ambarawa telah menerapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 dimana berfungsi sebagai aplikasi yang dipergunakan untuk menatausahakan perkara yang diterima oleh pengadilan mulai dari pendaftaran hingga terbitnya produk pengadilan berupa putusan. Aplikasi yang awalnya dikembangkan di lingkungan peradilan umum ini kini sudah mencapai versi 3.3.0-5 yang saat ini sudah bisa diimplementasikan di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. Sebagaimana pengadilan lainnya, Pengadilan Agama Ambarawa juga secara langsung melakukan implementasi aplikasi SIPP ini. Diharapkan dengan adanya implementasi SIPP secara menyeluruh maka pelayanan kepada para pencari keadilan dapat lebih cepat, professional dan transparan.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di lingkungan peradilan terdapat beberapa jenis pelayanan publik unggulan yang disajikan bagi masyarakat diantaranya Akreditasi Penjaminan Mutu, Perkara Prodeo, Pelayanan Bantuan Hukum, Sidang Keliling dan sebagainya.

D. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi atau pentauliahan adalah pengakuan terhadap lembaga yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya. Adapun Penjaminan Mutu adalah Serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan Akreditasi ini merupakan pengembangan dari kegiatan Sertifikasi ISO yang dilakukan oleh pengadilan guna mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan pengadilan.



Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Ambarawa dengan segala keterbatasan yang dimiliki alhamdulillah berhasil melakukan proses Akreditasi Penjaminan Mutu dan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Asesor Eksternal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mendapat predikat A (Excellent). Hasil tersebut merupakan pondasi awal dilakukannya standarisasi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat yang diharapkan dapat terus meningkat di tahun berikutnya.

E. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan dipermudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut "PTSP"). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus

2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Agama Ambarawa ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan Lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
- 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk proses serta penyelesaian permohonan layanan,
- 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa,

- 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
- 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

F. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Mahkamah Agung (MA) meluncurkan 9 inovasi aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Aplikasi tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama Ambarawa.

Adapun 9 inovasi aplikasi tersebut diantaranya, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Informasi Perkara dan Informasi Produk Pengadilan Agama, Aplikasi Antrean Sidang, Aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K), Command Center Badilag, Aplikasi e-Eksaminasi, Aplikasi PNBPN, e-Register Perkara, e-Kepastian Jadwal Sidang Perkara.

Aplikasi tersebut bertujuan untuk mendukung penerapan sistem peradilan secara elektronik (e-Litigasi) di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di Pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal persidangan tanpa perlu penumpukan antrean.

Serta, memberikan kemudahan mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) dengan aplikasi Verifikasi Data Kemiskinan (Kerjasama dengan AIPJ & TNP2K).

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan, Pengawasan Internal dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan bulanan maupun triwulan secara *komprensif* terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yaitu meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok kepaniteraan, yaitu administrasi perkara dan administrasi persidangan;
2. Pelaksanaan tugas pokok kesekretariatan yaitu administrasi kepegawaian, keuangan dan administrasi umum;
3. Evaluasi penyelenggaraan manajemen peradilan yaitu kepemimpinan, kinerja peradilan, kedisiplinan dan pelayanan publik;

Sebagai tindak lanjut pengawasan Internal, pada Pengadilan Agama Ambarawa menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa tentang Hakim Pengawas Bidang, dan dalam kurun satu tahun (tahun 2019) Hakim Pengawas bidang melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : W11-A33/ 2333 /PS/I/2020 tanggal 07 September 2020 terhitung mulai bulan September 2020 susunan Hakim pengawas bidang sebagai berikut :

DAFTAR HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN	HAKIM PENGAWAS
1	ISHAK LUBIS, S.Ag NIP. 19690622.199703.1.001	Hakim Madya Utama / Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	Rashif Imany, S.H.I, M.S.I NIP. 19851129 201101 1 005	Hakim Pratama Utama	Bidang Administrasi Kesekretariatan : Bagian Umum dan Keuangan Bagian Kepegawaian dan Ortala Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

3	1. Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H NIP. 19680212 199403 1 007	Hakim Madya Utama	Bidang Administrasi Keperkaraan : Proses Penerimaan Perkara Surat Gugatan / Permohonan Register Perkara Keuangan Perkara Minutasi Bidang Keperkaraan : Arsip Perkara Laporan Perkara
---	---	----------------------	--

Para Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugasnya dengan bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai petunjuk setiap tiga bulan sekali hakim Pengawas Bidang melaksanakan tugas pengawasan di bawah koordinator Wakil Ketua, akan tetapi mengingat pentingnya pengawasan intern di Pengadilan Agama Ambarawa yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, maka dipandang perlu melakukan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap bulan dan dua bulan kedepan melakukan pembinaan dan tindak lanjut dari hasil temuannya dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambarawa setiap tiga bulan sekali.

B. EVALUASI

Dalam kaitannya dengan pengawasan internal, Pengadilan Agama Ambarawa sebagai institusi di bawah Mahkamah Agung RI yang melakukan pembinaan terhadap peradilan agama memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 maupun Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Komitmen tersebut, salah satunya diwujudkan dengan membentuk Tim Monitoring Program Prioritas Pembaruan serta menetapkan 7 program prioritas pembaruan yang tertuang didalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011.

1. PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah. Pasca penyatuatapan lembaga peradilan agama dibawah Mahkamah Agung RI pada bulan Juni 2004, perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama

ada kecenderungan meningkat. Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama pada lima tahun terakhir (2015, 2016, 2018, 2019,2020) adalah:

Tahun	Jumlah Perkara Masuk
2016	1.386
2017	1.338
2018	1.430
2019	1.599
2020	1.641

Sementara itu bila dilihat dari sisa perkara pada lima tahun terakhir (2016, 2017, 2018, 2019,2020) ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja pegawai dalam proses penyelesaian perkara didukung oleh sumber daya yang cukup memadai kecuali pada tahun 2018 dimana sisa perkara meningkat sebab jumlah hakim yang menangani penyelesaian perkara mengalami penurunan yang signifikan sehingga sisa perkara meningkat. Namun di tahun 2019 jumlah sisa perkara mulai menurun signifikan. Sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah Sisa Perkara
2016	296
2017	289
2018	337
2019	37
2020	23

Kecenderungan jumlah perkara yang diajukan masyarakat ke Pengadilan Agama menurun, kemungkinan di samping disebabkan karena meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, juga disebabkan karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama. Dan sisa perkara ada kecenderungan menurun, disebabkan karena peningkatan produktivitas kinerja majelis hakim dan diimbangi dengan penambahan jumlah personil yang cukup memadai.

2. PROGRAM MANAJEMEN SDM

Sumber Daya Manusia sangat penting dalam menunjang pelayanan instansi yang menuju ke Pelayanan Prima. Pengadilan Agama Ambarawa selama tahun 2020 melakukan serangkain manajemen SDM baik dalam peningkatan SDM secara manajerial maupun mental, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Pembinaan Pegawai

Pengadilan Agama Ambarawa melakukan Rapat Pembinaan setiap bulan guna melakukan evaluasi terhadap permasalahan dan mencari solusi dalam permasalahan tersebut dalam bungkus permusyawaratan, ini dilakukan guna tercapainya kondisi kantor yang dinamis dan nyaman.

b. Diklat di Tempat Kerja (DDTK)

Adanya beberapa *update* aplikasi yang ada pada tahun 2020 seperti aplikasi SIPP memunculkan suatu problema yaitu terkait pelaksanaan atau implementasi dari aplikasi tersebut. Terkait hal tersebut Pengadilan Agama Ambarawa berupaya untuk memaksimalkan semua elemen yang ada guna menunjang hal tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan Diklat di Tempat Kerja atau Sosialisasi yang berkesinambungan.

c. Pembinaan Hakim, Panitera, Jurusita, dan Operator IT

Seluruh Pengadilan Se-eks Karesidenan Semarang melakukan pembinaan hakim, panitera, jurusita dan operator IT guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan sharing antar Pengadilan Agama, Pembinaan ini selama tahun 2020 dibagi menjadi 2 semester dimana semester pertama pembinaan hakim, dan semester ke-2 adalah pembinaan panitera, jurusita dan operator IT. Pengadilan Agama Ambarawa berperan aktif dalam kegiatan tersebut dan mengirimkan pegawainya guna mendapatkan pelatihan maupun sharing dan untuk kemajuan Pengadilan Agama Ambarawa.

d. Apel Senin Pagi

Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020 secara rutin menyelenggarakan apel senin pagi setiap minggunya. Acara apel senin pagi ini biasanya diisi dengan pembinaan dan pengarahan singkat yang disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Ambarawa.

3. PROGRAM PENGELOLAAN WEBSITE

Website merupakan kawal depan bagi wajah kantor di dunia virtual, sehingga bisa dikatakan bahwa website merupakan kantor kedua selain kantor utama di dunia nyata. Konten sebuah website secara tidak langsung juga menunjukkan isi dari sebuah kantor secara keseluruhan. Memang seringkali kita tidak sadar bahwa informasi yang terdapat di dalam website itu sangatlah luas bahkan melebihi informasi yang bisa didapatkan di dunia nyata, sehingga bisa dikatakan bahwa ketersediaan suatu website merupakan suatu keharusan beserta segala informasi yang terkandung didalamnya. Pengelolaan website di lingkungan peradilan agama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu pedoman, selain SK KMA Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi di Pengadilan yang menghapus SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Berbekal 2 (dua) peraturan tersebut

Pengadilan Agama Ambarawa berupaya menyajikan informasi sesuai dengan peraturan yang terdapat didalamnya.

Di era globalisasi ini peran teknologi informasi sangatlah vital dalam kemudahan dalam mendapatkan informasi yang informatif, akurat dan efisien. Salah satunya adalah website sebagai media informasi sekaligus sebagai wajah peradilan, semua informasi baik kegiatan, laporan keuangan, inventaris, perkara, bahkan pengaduan, saran dan kritik pun disajikan dalam bentuk satu rangkaian yang dinamis dalam wadah website.

Pengadilan Agama Ambarawa selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam menyajikan informasi dengan media website ini, ditahun 2019 Pengadilan Agama Ambarawa melakukan perbaikan website, diantaranya dari sisi user interface (antar muka pengguna) agar benar-benar user friendly, begitu pula dalam updating konten/isi website itu sendiri, melakukan updating informasi yang aktual.

Pembentukan TIM IT pada Pengadilan Agama Ambarawa sebagai bentuk keseriusan Pengadilan Agama Ambarawa dalam membangun sistem yang moderen, efisien, efektif dan akuntabilitas dalam penyajian laporan-laporan guna memenuhi kebutuhan pencari keadilan akan informasi maupun pihak lain yang membutuhkan informasi guna tercapainya pelayanan prima 1x24 jam. Poin-poin dalam pengelolaan website diantaranya adalah :

a. Bidang kesekretariatan

1) Keuangan

Guna tercapainya Transparansi Anggaran, Pengadilan Agama Ambarawa melakukan updating dalam bidang keuangan di Pengadilan Agama Ambarawa di tahun 2020 antara lain :

a) DIPA

DIPA yang diterima Pengadilan Agama Ambarawa di masukan sebagai konten website sebagai bentuk Transparansi Anggaran selama 2020

b) LRA

Realisasi Anggaran 2020 disajikan dalam bentuk kolom perbulan

c) PNBP

PNBP disajikan dalam bentuk kolom sebagai bentuk transparansi anggaran.

2) Umum

a) Data Inventaris

Data inventaris barang disajikan dalam konten website agar pencari informasi dengan mudah mengetahui keadaan dan barang yang dimiliki kantor Pengadilan Agama Ambarawa guna tercapainya transparansi

- b) Neraca SIMAK BMN
- c) Persediaan
- 3) Kepegawaian
 - a) DUK

DUK Pengadilan Agama Ambarawa disajikan update setiap tahun sekali dan untuk profil pegawai di *update* berkala setiap ada perubahan pegawai
 - b) Statistik Pegawai

Statistik pegawai disajikan agar pencari informasi dengan mudah mengetahui keadaan pegawai Pengadilan Agama Ambarawa
- b. Bidang Kepaniteraan
 - 1. Pelayanan Perkara

Pelayanan perkara disajikan berupa konten layanan-layanan perkara seperti syarat pendaftaran, biaya perkara sehingga sangat informatif bagi para pencari keadilan
 - 2. Informasi Perkara

Informasi perkara ini bisa dalam bentuk statistik perkara, putusan, dan informasi-informasi lainnya yang sekiranya dibutuhkan oleh pencari keadilan maupun pihak lain.
- c. Lain-lain

Pengaduan Online dan buku tamu menjadi sarana kritik dan saran untuk Pengadilan Agama Ambarawa, ini sangat efektif dimana ketika para pencari keadilan segan untuk menyampaikannya secara langsung mereka bisa menyampaikannya melalui buku tamu atau surat elektronik.

4. PROGRAM PELAYANAN PUBLIK DAN MEJA INFORMASI

Untuk memaksimalkan penerapan Meja Informasi di lingkungan peradilan agama, Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. Pedoman ini memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana seharusnya Meja Informasi harus diimplementasikan di seluruh Pengadilan Agama. Pengadilan harus dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan para pencari keadilan secara akurat dan cepat.

Selama ini di Kantor Pengadilan Agama Ambarawa sudah terdapat Meja Informasi yang merupakan pusat informasi dan pelayanan bagi publik, jadi hampir semua informasi baik informasi mengenai keperkaraan, kesekretariatan sampai pengaduan masyarakat ditampung dan ditangani di bagian meja informasi. Untuk mendukung pelayanan publik dan informasi, Pengadilan Agama Ambarawa juga menyediakan sebuah komputer sentral berbasis sentuhan (KIOSK) dimana pada komputer tersebut bisa menampilkan informasi perkara secara *realtime* baik

keadaan perkara, jadwal sidang, sampai keuangan perkara bagi para pencari keadilan. Selain itu juga terdapat sebuah Media Center berupa televisi yang menayangkan jadwal sidang dan perkara yang diputus pada hari tersebut.

Selain hal tersebut diatas, dengan diluncurkannya aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) maka semakin memantapkan Pengadilan Agama Ambarawa dalam pemberian layanan informasi secara profesional, sebab masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlindungi hak-haknya dalam mendapatkan informasi sesuai dengan koridor yang berlaku.

5. PROGRAM IMPLEMENTASI SIPP

Untuk memanfaatkan teknologi informasi pada proses administrasi peradilan di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Ambarawa telah memanfaatkan aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama yaitu Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi SIPP ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerapan sekaligus otomatisasi Pola Bindalmin di lingkungan peradilan agama. Sebagai sebuah sistem manajemen perkara (case management system), program aplikasi ini sangat bermanfaat di bidang administrasi peradilan. Proses pengolahan dokumen perkara dilakukan dengan lebih cepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan bisa lebih ditingkatkan. Ia juga bermanfaat mengatasi persoalan peningkatan perkara yang tidak berbanding lurus dengan tersedianya tenaga pelaksana administrasi perkara.

Faktor pendukung keberhasilan implementasi aplikasi SIPP di lingkungan peradilan agama, antara lain komitmen pimpinan/kebijakan, kualitas SDM, infrastruktur, dan anggaran pemeliharaan. Dari mulai aplikasi SIPP ini dilahirkan, Pengadilan Agama Ambarawa terus berupaya meningkatkan fungsi dan kegunaan aplikasi tersebut di segala lini bidang administrasi kepaniteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi SIPP mulai dari proses Pendaftaran Perkara sampai dengan Penerbitan Akta Cerai. Selain itu dilihat dari validitas data yang dihasilkan, apabila dilihat dari portal yang khusus menangani data SIPP yaitu sipp.mahkamahagung.go.id, prosentase update dan validitas data Pengadilan Agama Ambarawa hampir selalu diatas 75 %.

6. PROGRAM PERKARA PRODEO

Perkara Prodeo merupakan salah satu dari Program Justice For All yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama dimana program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada Pihak Berperkara yang masuk kategori tidak mampu atau berperkara secara cuma-cuma. Pada pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, Pengadilan Agama Ambarawa selalu mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo.

7. PENGAWASAN

Pada dasarnya tugas pengawasan adalah menjadi tugas pokok Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pengawasan meliputi tugas-tugas pemeriksaan teknis peradilan, pemeriksaan administrasi peradilan dan pemeriksaan administrasi umum. Selama tahun 2019 tidak ada pegawai Pengadilan Agama Ambarawa yang mendapatkan sanksi disiplin baik yang sifatnya ringan maupun berat. Selain itu untuk proses pengawasan internal selalu dilakukan dengan melakukan pembinaan secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Pimpinan atau secara berkala yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sehingga alur kerja dan profesionalisme pegawai Pengadilan Agama Ambarawa selalu terjaga.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2020 yakni sebesar **90,02** % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada akhir tahun lebih sedikit dari sisa perkara tahun sebelumnya.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, umum dan keuangan, serta perencanaan telah dilaksanakan baik.
6. Pengadilan Agama Ambarawa merasakan sangat kekurangan pegawai, terutama untuk staf sekretariat.

B. REKOMENDASI

1. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran.
2. Kedepannya agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal terkait sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI.
3. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada unsur Pejabat Pengadilan Agama Ambarawa agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan penyelesaian perkara sampai 100 % perkara yang diterima pada tahun berjalan.
4. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika

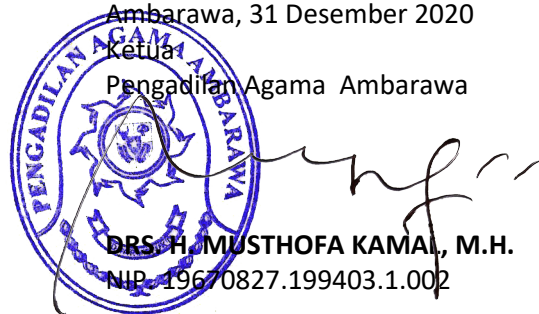
pegawai guna mewujudkan aparat aparatur peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia.

Demikian Laporan tahunan tahun 2020 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Ambarawa Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Ambarawa kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Ambarawa, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya 2020 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Aamiin.

Ambarawa, 31 Desember 2020

Ketua
Pengadilan Agama Ambarawa



DRS. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.
NIP. 19670827.199403.1.002

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Laporan Tahunan 2019 Pengadilan Agama Ambarawa. Ambarawa : Pengadilan Agama Ambarawa.

Tim Penyusun LkjIP 2019. 2020. LkjIP 2019 Pengadilan Agama Ambarawa. Ambarawa : Pengadilan Agama Ambarawa.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa. 2019,2020. Laporan Bulanan Perkara Pengadilan Agama Ambarawa . Ambarawa : Pengadilan Agama Ambarawa.

LAMPIRAN

KEPANITERAAN

DATA DETIL PERKARA

SISA PERKARA TAHUN 2019

KEADAAN PERKARA

Dari 37 sisa perkara tahun 2019 tersebut dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	1 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	14 perkara
7) Cerai Gugat	=	20 perkara
8) Harta Bersama	=	1 perkara
9) Penguasaan Anak	=	- perkara
10) Nafkah oleh Ibu	=	- perkara
11) Hak-Hak Bekas Istri	=	- perkara
12) Pengesahan Anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	- perkara
15) Pencabutan Kekuasaan Wali	=	- perkara
16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	=	- perkara
17) Ganti Rugi Terhadap Wali	=	- perkara
18) Asal Usul Anak	=	1 perkara
19) Penolakan Kawin Campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	- perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	- perkara

23) Wali Adlol	=	- perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	- perkara
25) Kewarisan	=	- perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	- perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara
30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	- perkara
31) Lain-Lain	=	- perkara
32) Ditolak	=	- perkara
33) Tidak Diterima	=	- perkara
34) Gugur	=	- perkara
35) Dicoret dari Pendaftaran	=	- perkara
36) Dicabut	=	- perkara

PENYELESAIAN PERKARA

Dari 37 sisa perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2020, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	1 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	- perkara
5) Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	14 perkara
7) Cerai Gugat	=	20 perkara
8) Harta Bersama	=	1 perkara
9) Penguasaan Anak	=	- perkara
10) Nafkah Oleh Ibu	=	- perkara
11) Hak-Hak Bekas Istri	=	- perkara
12) Pengesahan Anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	- perkara

15) Pencabutan Kekuasaan Wali	=	- perkara
16) Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	=	- perkara
17) Ganti Rugi Terhadap Wali	=	- perkara
18) Asal usul Anak	=	1 perkara
19) Penolakan Kawin Campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	- perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	- perkara
23) Wali Adlol	=	- perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	- perkara
25) Kewarisan	=	- perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	- perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara
30) P3HP/ Penetapan Ahli Waris	=	- perkara
31) Lain-Lain	=	- perkara
32) Ditolak	=	- perkara
33) Tidak Diterima	=	- perkara
34) Gugur	=	- perkara
35) Dicoret dari Pendaftaran	=	- perkara
36) Dicabut	=	- perkara

PERKARA TAHUN 2020

KEADAAN PERKARA

Dari 1.641 perkara yang diterima pada tahun 2020 tersebut, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	7 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	1 perkara
5) Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	=	- perkara

6) Cerai Talak	=	329 perkara
7) Cerai Gugat	=	965 perkara
8) Harta Bersama	=	5 perkara
9) Penguasaan Anak	=	5 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	40 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	10 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	5 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	238 perkara
23) Ekonomi Syari'ah	=	2 perkara
24) Wali adlol	=	14 perkara
25) Kewarisan	=	1 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	2 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh/ Zakat / infaq	=	- perkara
30) P3HP / Penetapan Ahli waris	=	8 perkara
31) lain-lain	=	9 perkara
32) Pengangkatan Anak	=	- perkara

PENYELESAIAN PERKARA

Adapun 1.655 perkara yang diputus/diselesaikan pada tahun 2020, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut :

1) Izin Poligami	=	6 perkara
2) Pencegahan Perkawinan	=	- perkara
3) Penolakan Perkawinan	=	- perkara
4) Pembatalan Perkawinan	=	1 perkara
5) Kelalaian Kewajiban suami/istri	=	- perkara
6) Cerai Talak	=	297 perkara
7) Cerai Gugat	=	919 perkara
8) Harta Bersama	=	2 perkara
9) Penguasaan Anak	=	4 perkara
10) Nafkah oleh ibu	=	- perkara
11) Hak-hak bekas istri	=	- perkara
12) Pengesahan anak	=	- perkara
13) Pencabutan Kekuasaan orang tua	=	- perkara
14) Perwalian	=	37 perkara
15) Pencabutan Kekuasaan wali	=	- perkara
16) Penunjukan orang lain sebagai wali	=	- perkara
17) Ganti rugi terhadap wali	=	- perkara
18) Asal usul anak	=	9 perkara
19) Penolakan Kawin campur	=	- perkara
20) Istbat Nikah	=	3 perkara
21) Izin Kawin	=	- perkara
22) Dispensasi Kawin	=	218 perkara
23) Wali adlol	=	14 perkara
24) Ekonomi Syari'ah	=	2 perkara
25) Kewarisan	=	2 perkara
26) Wasiat	=	- perkara
27) Hibah	=	1 perkara
28) Wakaf	=	- perkara
29) Sodaqoh / Zakat /Infaq	=	- perkara

30) P3HP/ penetapan Ahli Waris	=	7 perkara
31) lain-lain	=	6 perkara
32) Ditolak	=	11 perkara
33) Tidak diterima	=	10 perkara
34) Gugur	=	10 perkara
35) Dicoret dari pendaftaran	=	5 perkara
36) Dicabut	=	85 perkara
37) Pengangkatan Anak	=	- perkara

RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

Perkara yang disidangkan Pengadilan Agama Ambarawa sebanyak 1.678 perkara. Adapun dari segi produktivitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dan gugatan selama tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis : Nur Lailah Ahmad, S.H.
Hakim Anggota : -
Perkara yang ditangani 70 perkara dan diselesaikan 170 perkara, sisa 1 perkara.
- b. Ketua Majelis : Drs. H. Musthofa Kamal, MH.
Hakim Anggota : -
Perkara yang ditangani 225 dan diselesaikan 222 perkara, sisa 3 perkara.
- c. Ketua Majelis : Ishak Lubis, S.Ag.
Hakim Anggota : -
Perkara yang ditangani 108 dan diselesaikan 103 perkara, sisa 5 perkara.
- d. Ketua Majelis : Drs. H. Saefudin, SH., MH.
Hakim Anggota : -
Perkara yang ditangani 257 perkara dan diselesaikan 257 perkara, sisa 0 perkara.
- e. Ketua Majelis : Rashif Imany, S.HI, M.SI
Hakim Anggota : -
Perkara yang ditangani 519 perkara dan diselesaikan 504 perkara, sisa 15 perkara.
- f. Ketua Majelis : Siti Khoiriyah, S.HI, MH.
Hakim Anggota : -
Perkara yang ditangani 499 perkara dan diselesaikan 493 perkara, sisa 6 perkara.

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING

Dari 7 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 2 putusan yang dikuatkan di tingkat Banding. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Tanggal Putus
1.	1000/Pdt.G/2019/PA.Amb	122/Pdt.G/2020/PTA.Smg	29-04-2020
2	229/Pdt.G/2020/PA.Amb	195/Pdt.G/2020/PTA.Smg	09-07-2020

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING

Dari 7 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 2 putusan yang dibatalkan di tingkat Banding. Data perkara tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Perkara Tk. I	Nomor Putusan Tk. Banding	Keterangan
1.	173/Pdt.G/2020/PA.Amb	233/Pdt.G/2020/PTA.Smg	Tidak Memenuhi Syarat
2.	0911/Pdt.G/2020/PA.Amb	111/Pdt.G/2020/PTA.Smg	Tidak Memenuhi Syarat

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. BANDING

Dari 7 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 0 putusan pengadilan TK.I yang tidak dapat diterima oleh Tk. Banding.

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIAJUKAN KE TK. BANDING TETAPI BELUM DIPUTUS

Dari 7 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 3 putusan pengadilan tingkat I yang diajukan ke tingkat Banding tetapi belum diputus.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DICABUT

Dari 7 perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Banding terdapat 0 perkara yang dicabut.

PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI

Data perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 5 perkara yang terdiri dari 1 perkara tahun 2018 dan 4 perkara tahun 2019. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus sebanyak 0 perkara sehingga sisa perkara Kasasi tahun 2020 sebanyak 5 perkara.

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. KASASI.

Tidak ada perkara Pengadilan Agama Ambarawa yang diajukan ke tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat Kasasi.

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI.

Tidak ada perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Ambarawa yang dikuatkan tingkat banding dan dibatalkan di tingkat kasasi.

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara yang dikuatkan tingkat banding dan tidak dapat diterima di tingkat kasasi.

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DITOLAK TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** Putusan yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak di tingkat Kasasi.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN BELUM DIPUTUS DI TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa terdapat 2 perkara Putusan yang dikuatkan Tk. Banding dan belum diputus di tingkat Kasasi.

F. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan di tingkat Kasasi.

G. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan di tingkat Kasasi.

H. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN BELUM DIPUTUS TK. KASASI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa terdapat 3 putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan belum diputus di tingkat Kasasi

PERKARA YANG DIAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI

Data perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebanyak 2 perkara yang belum diputus di tahun 2019.

A. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

B. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

C. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

D. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** perkara yang dibatalkan tingkat Banding dan dikuatkan tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat Peninjauan Kembali.

E. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

F. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

G. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

H. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIKUATKAN TK. BANDING DAN TIDAK DAPAT DITERIMA TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

I. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIKUATKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

J. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG DIBATALKAN TK. BANDING DAN DIBATALKAN TK. KASASI YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

K. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang **Berkekuatan** Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

L. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada **Pengadilan** Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

M. PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIKUATKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. Peninjauan Kembali.

N. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa terdapat 1 putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

O. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

P. PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DIBATALKAN TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa terdapat 1 putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. Peninjauan Kembali.

Q. PUTUSAN PENGADILAN TK. I YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali.

R. PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. Peninjauan Kembali.

S. PUTUSAN KASASI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG BELUM DIPUTUS TK. PENINJAUAN KEMBALI.

Pada Pengadilan Agama Ambarawa **TIDAK TERDAPAT** putusan Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang belum diputus Tk. Peninjauan Kembali .

POS BANTUAN HUKUM

Data pelaksanaan kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Bulan	REALISASI PELAKSANAAN POSBAKUM				ANGGARAN DIPA
		Jam Layanan	Target Jumlah Layanan	Jumlah Layanan	Jumlah Perkara	
1	Januari	39	15	39	33	2.805.000
2	Februari	53	15	53	50	2.640.000
3	Maret	37	25	37	37	2.805.000
4	April	23	15	23	21	2.970.000
5	Mei	15	15	15	12	1.815.000
6	Juni	58	25	58	58	2.805.000
7	Juli	58	25	58	58	2.970.000
8	Agustus	63	25	63	63	2.475.000
9	September	84	30	84	81	2.970.000
10	Oktober	63	30	63	63	2.640.000
11	November	80	30	80	80	2.805.000
12	Desember	27	5	27	27	300.000
TOTAL		600	255	600	538	30.000.000



SEKRETARIAT

KEGIATAN SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	JABATAN	PENDIDIKAN							JML
		SD	SLTP	SLTA	SM	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KETUA	-	-	-	-	-	1	-	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	1	-	-	1
3	HAKIM	-	-	-	-	-	2	-	2
4	PANITERA	-	-	-	-	1	-	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	1	-	1
6	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	1	-	-	1
7	PANMUD GUGATAN	-	-	-	-	-	1	-	1
8	PANMUD PERMOHONAN	-	-	-	-	1	-	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	-	4	1	1	6
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	-	1	-	-	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	1	-	-	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	-	-	-	1	-	1
13	JURUSITA	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JURUSITA PENGGANTI	-	-	2	-	-	-	-	2
15	STAF	-	-	1	-	-	-	-	1
JUMLAH		-	-	3	-	10	7	1	21
		21							

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2020

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG

NO	JABATAN	GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JML
1	2	7	12	17	22	23
1	KETUA	-	-	-	1	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	1	1
3	HAKIM	-	-	2	-	2
4	PANITERA	-	-	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	1	-	1
6	PANMUD HUKUM	-	-	1	-	1
7	PANMUD GUGATAN	-	-	-	1	1
8	PANMUD PERMOHONAN	-	-	1	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	-	-	6	-	6
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	1	-	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	1	-	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	1	-	1
13	JURUSITA PENGGANTI	-	2	-	-	2
14	STAF	-	-	1	-	1
JUMLAH		-	2	16	3	21

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JABATAN	GOLONGAN		
		L	P	JML
1	2	7	12	23
1	KETUA	1	-	1
2	WAKIL KETUA	1	-	1
3	HAKIM	1	1	2
4	PANITERA	-	1	1
5	SEKRETARIS	-	1	1
6	PANMUD HUKUM	-	1	1
7	PANMUD GUGATAN	-	1	1
8	PANMUD PERMOHONAN	1	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	4	2	6
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	1	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	1	-	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	1	-	1
13	JURUSITA PENGGANTI	2	-	2
14	STAF	-	1	1
JUMLAH		12	9	21
		21		

STATISTIK PEGAWAI BERDASARKAN RENTANG USIA

NO	JABATAN	GOLONGAN								JML
		<25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>56	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	WAKIL KETUA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	HAKIM	-	-	1	-	1	-	-	-	2
4	PANITERA	-	-	-	-	-	-	1	-	1
5	SEKRETARIS	-	-	-	-	1	-	-	-	1
6	PANMUD HUKUM	-	-	-	-	-	-	1	-	1
7	PANMUD GUGATAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1
8	PANMUD PERMOHONAN	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9	PANITERA PENGGANTI	-	-	-	5	1	-	-	-	6
10	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
11	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12	KASUBBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1
13	JURUSITA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JURUSITA PENGGANTI	-	-	-	-	-	-	1	1	2
15	STAF	-	-	1	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		-	-	3	7	4	-	6	1	21
		21								

SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2020 adalah sebanyak 21 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:

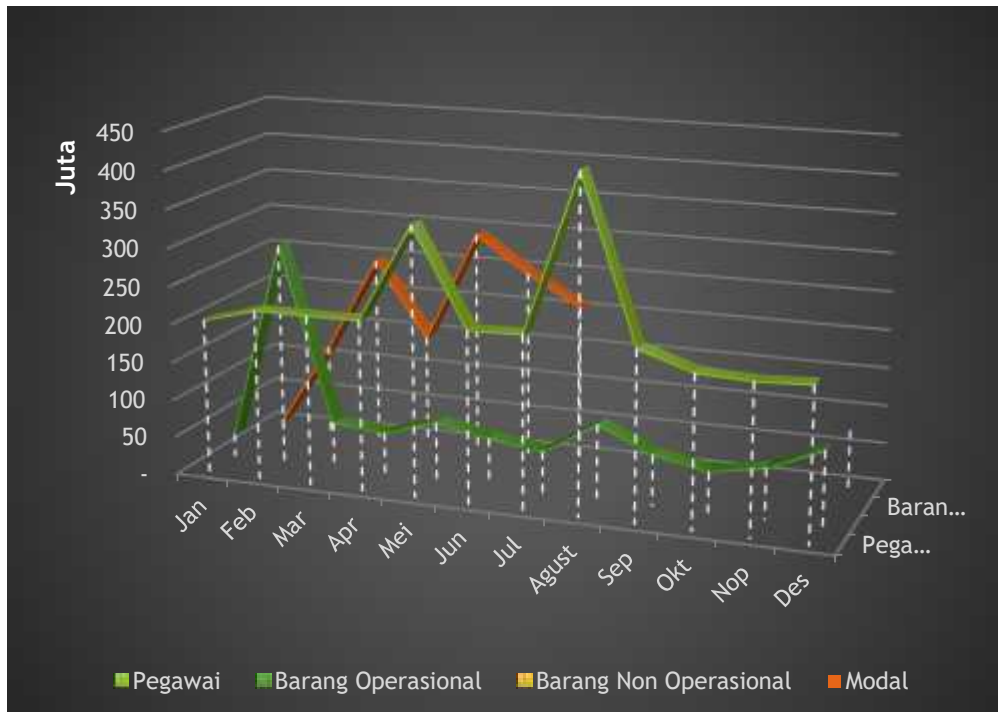
NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Drs. H. Musthofa Kamal, MH	Ketua	
2.	Ishak Lubis, S.Ag	Wakil Ketua	
3.	Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H.	Hakim	
4.	Rashif Imany, SHI., MSI	Hakim	
5.	Dra. Azizah Triningsih, SH	Panitera	
6.	Fenia Ariasti, SE., MH.	Sekretaris	
7.	Dra. Widad	Panitera Muda Hukum	
8.	Arifah S. Maspeke, S. Ag.	Panitera Muda Gugatan	
9.	Mohammad Adib Fajrudin, S. Ag.	Panitera Muda Permohonan	
10.	Martasaputra A R U	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	
11.	Nur Arifah Kadir, S. Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	

12.	Heri Sulistiono, S.Kom	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kepegawaian	
13.	Khalim Mudrik Masruhan, S.Sy.	Panitera Pengganti	
14.	Ana Jatmikowati, S.PdI	Panitera Pengganti	
15.	Ambar Setiawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	
16.	M Nur Hasan Latief, SHI.,SH.,MM.	Panitera Pengganti	
17.	Sukarna, SHI	Panitera Pengganti	
18.	Ahmad Roikan, S.Sy	Panitera Pengganti	
19.	Adnani	Jurusita Pengganti	
20.	Sabar Budi Santosa	Jurusita Pengganti	
21.	Dicka Martyastanti, S.Psi	Staf Pelaksana	

KEGIATAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

REALISASI ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Bulan	REALISASI BELANJA				TOTAL DIPA
		PEGAWAI	BARANG OPERASIONAL	BARANG NON OPERASIONAL	MODAL	
1	Januari	203.904.978	28.913.200	-	6.910.000	239.728.178
2	Februari	222.513.178	290.874.100	-	118.004.414	631.391.692
3	Maret	222.076.870	60.114.200	-	245.100.000	527.291.070
4	April	223.174.774	54.068.200	-	144.627.300	421.870.274
5	Mei	349.972.415	75.784.000	-	291.717.000	717.473.415
6	Juni	223.154.271	62.610.300	-	245.042.900	530.807.471
7	Juli	224.883.948	53.140.100	-	206.214.000	484.238.048
8	Agustus	432.596.544	96.785.812	-	-	529.382.356
9	September	220.812.525	65.576.004	-	-	286.388.529
10	Oktober	197.594.484	51.680.046	-	-	249.274.530
11	November	194.545.623	64.433.804	-	-	258.979.427
12	Desember	197.808.434	95.401.659	-	77.100.000	370.310.093



REALISASI ANGGARAN DIPA BADAN PERADILAN AGAMA

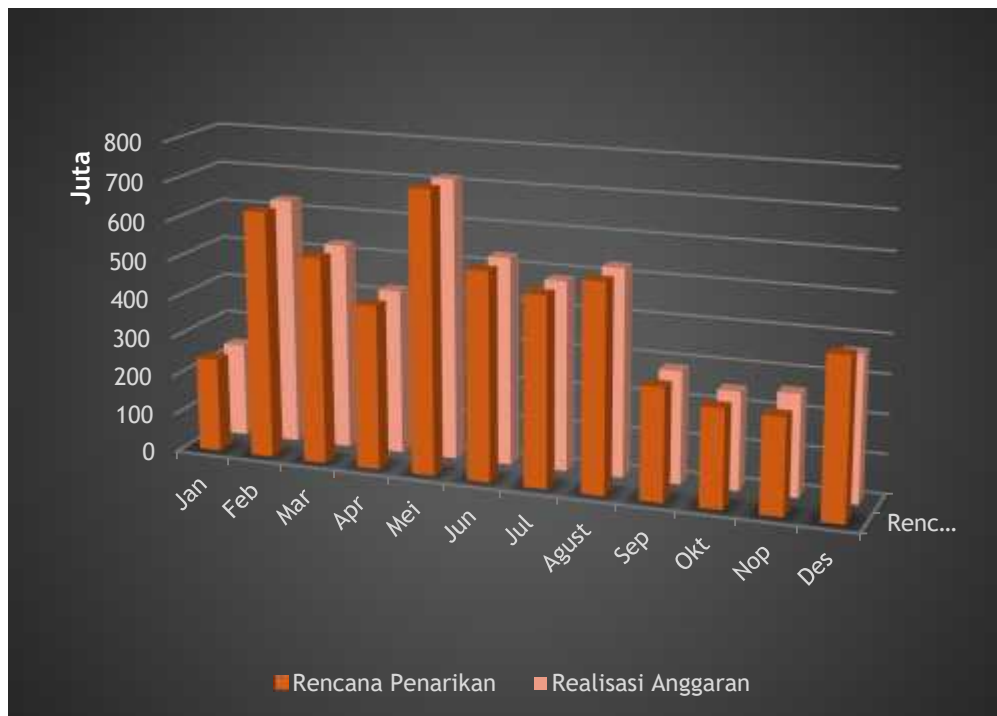
NO	Bulan	REALISASI BELANJA	TOTAL DIPA
1	Januari	-	
2	Februari	3.055.000	
3	Maret	3.640.000	
4	April	2.805.000	
5	Mei	3.720.000	
6	Juni	2.465.000	
7	Juli	2.805.000	
8	Agustus	-	
9	September	5.445.000	
10	Oktober	2.970.000	
11	November	2.640.000	
12	Desember	3.105.000	



KEGIATAN SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

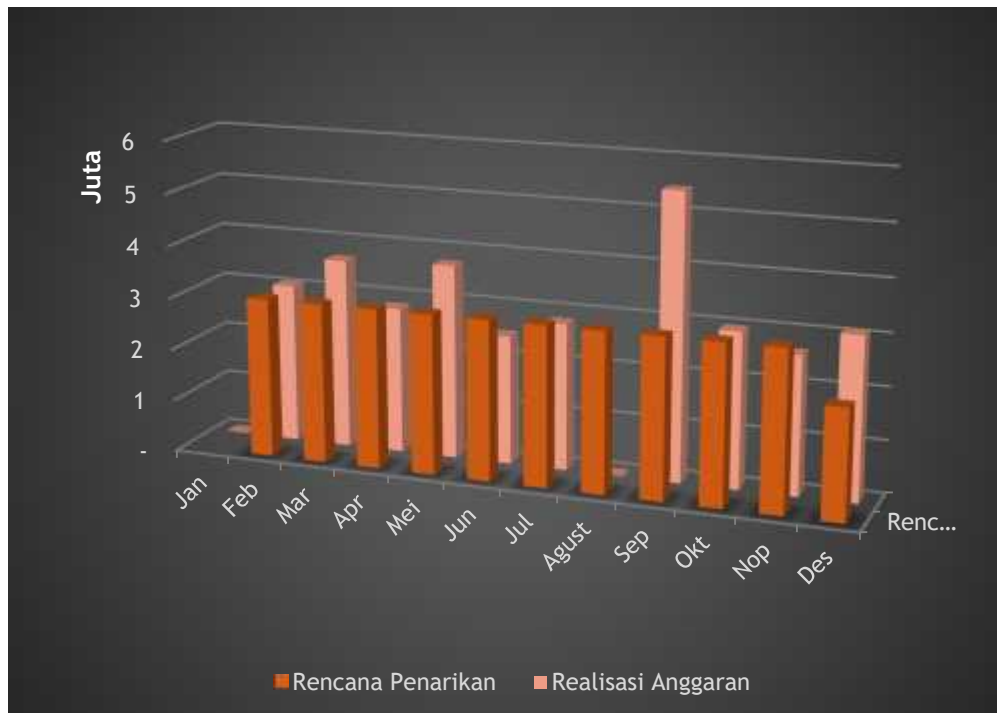
KOMPARASI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN DI PA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	Bulan	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN
1	Januari	239.728.169	239.728.178
2	Februari	631.391.690	631.391.692
3	Maret	527.291.069	527.291.070
4	April	419.142.974	421.870.274
5	Mei	720.200.713	717.473.415
6	Juni	530.807.470	530.807.471
7	Juli	484.298.636	484.238.048
8	Agustus	529.382.355	529.382.356
9	September	286.388.524	286.388.529
10	Oktober	249.274.523	249.274.530
11	November	244.545.620	258.979.427
12	Desember	406.234.257	370.310.093



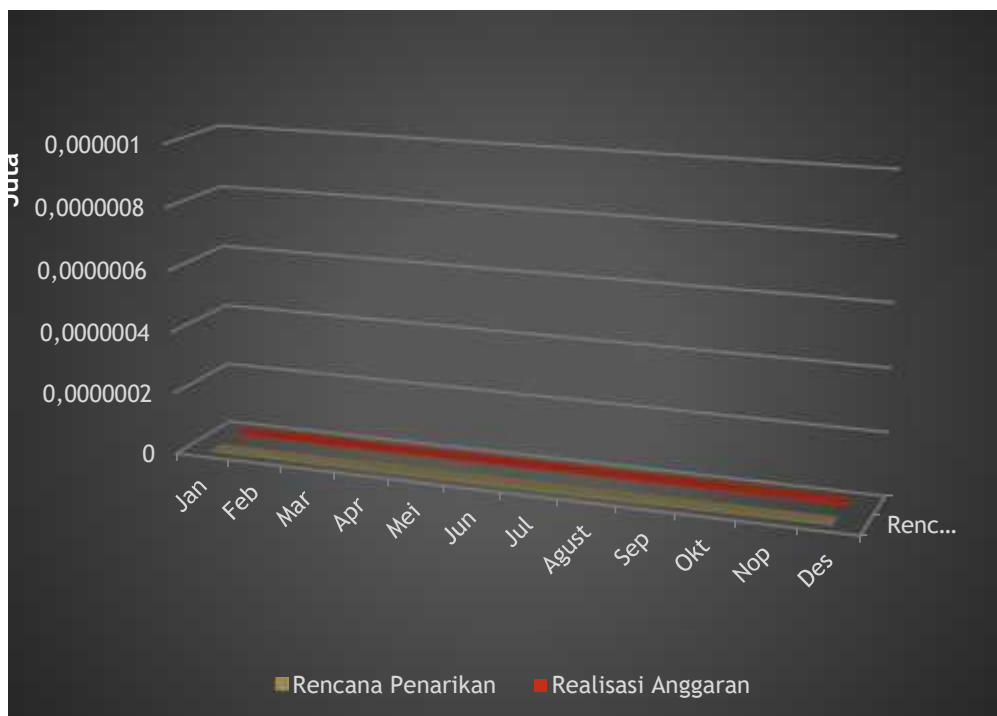
KOMPARASI RENCANA PENARIKAN ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN DI PA BADAN PERADILAN AGAMA

NO	Bulan	RENCANA PENARIKAN	REALISASI ANGGARAN
1	Januari	-	-
2	Februari	3.055.000	3.055.000
3	Maret	3.055.000	3.640.000
4	April	3.055.000	2.805.000
5	Mei	3.055.000	3.720.000
6	Juni	3.055.000	2.465.000
7	Juli	3.055.000	2.805.000
8	Agustus	3.055.000	-
9	September	3.055.000	5.445.000
10	Oktober	3.055.000	2.970.000
11	November	3.055.000	2.640.000
12	Desember	2.100.000	3.105.000



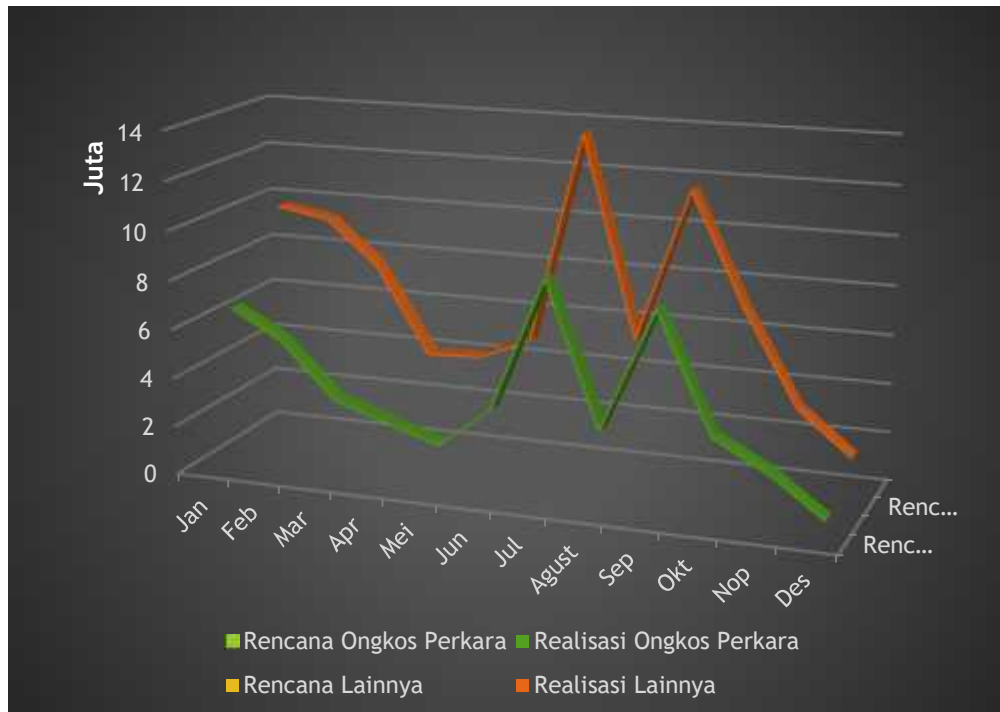
KOMPARASI RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI

No.	Bulan	RENCANA PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN
1	Januari	-	-
2	Februari	-	-
3	Maret	-	-
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	-	-
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	-	-
12	Desember	-	-



KOMPARASI RENCANA PENERIMAAN ANGGARAN DENGAN REALISASI PENERIMAAN ANGGARAN DIPA BADAN PERADILAN AGAMA

NO	Bulan	Ongkos Perkara		Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
1	Januari		6.290.000		9.590.000
2	Februari		5.050.000		9.221.000
3	Maret		2.840.000		7.364.000
4	April		2.130.000		3.802.000
5	Mei		1.430.000		3.883.500
6	Juni		3.140.000		4.810.500
7	Juli		8.640.000		13.522.000
8	Agustus		2.760.000		5.276.500
9	September		7.800.000		11.530.500
10	Oktober		2.970.000		6.916.500
11	November		1.770.000		3.022.500
12	Desember		150.000		1.242.500



DAFTAR REVISI DIPA

Data revisi DIPA Pengadilan Agama Ambarawa tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (005.01)

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi
1.	Perubahan Pejabat Pengelola DIPA	14-02-2020
2.	Pergeseran Antar Keluaran Antar Satker	02-07-2020
3.	Revisi Halaman III & Perubahan Halaman IV	08-09-2020
4.	Pergeseran Antar Keluaran Antar Satker	30-10-2020
5.	Revisi POK	17-12-2020
6.	Revisi POK	28-12-2020

DIPA BADAN PERADILAN AGAMA (005.04)

No	Jenis Revisi	Tanggal Revisi
1.	Perubahan Pejabat Pengelola DIPA	14-02-2020